

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
DALAM PENGELOLAAN PERTANIAN  
MELALUI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN  
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM**

(Studi pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran  
Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

Oleh:

Andi Febrian

Npm : 2051010287

Jurusan: Ekonomi Syariah



**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung  
1446 H/2024**



**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
DALAM PENGELOLAAN PERTANIAN MELALUI  
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DITINJAU  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran  
Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
(S.E) Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh:

Andi Febrian

Npm : 2051010287

Jurusan: Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Pembimbing I : Dr. Budimansyah, S.Th.i, M.Kom.I**

**Pembimbing II : Adib Fachri, M.E.Sy**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Universitas Islam Negeri**

**Raden Intan Lampung**

**1446 H/2024**

## ABSTRAK

Kecamatan Sekincau merupakan 4 kecamatan penghasil sayur terbesar dikabupaten Lampung Barat, dengan luas lahan yang cukup lumayan luas. Namun para petani yang ada disana mengalami kendala dalam pengelolaan pertanian seperti tidak memiliki lahan, kurangnya pemahaman tentang teknik yang baik dalam pengelolaan pertanian agar mendapat hasil yang memuaskan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan dampak dari pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan pertanian melalui pengembangan kelembagaannya dalam perspektif islam. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui implementasi dan dampak pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan pertanian melalui pengembangan kelembagaan dalam perspektif islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah petani yang ada dikawasan UPBS Sekincau sebanyak 33 petani dan 4 staff UPBS Sekincau, dengan informan staff dan petani yang ada dikawasan lembaga.

Hasil analisis ini adalah implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan pertanian melalui pengembangan kelembagaan sudah berhasil diterapkan dengan baik dan berpengaruh signifikan dengan beberapa hambatan yang harus dibenahi oleh pemerintahan. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan pertanian melalui pengembangan kelembagaan terhadap kesejahteraan masyarakat berdampak positif karena tercapainya indikator kesejahteraan yakni meliputi pendapatan perbulan, tingkat pengangguran, dan investasi/ tabungan petani. Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan pertanian melalui pengembangan kelembagaan dalam perspektif ekonomi Islam berdampak positif bagi seluruh masyarakat terbukti dari tercapainya kebutuhan manusia dalam maqasyid syariah yaitu kebutuhan *dharuriyah*, kebutuhan *al-hajiyyah* dan kebutuhan *Tahsiniyah*, dalam pemberdayaannya telah menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan Ekonomi Islam yakni: *Prinsip Ukhuwah*, *Prinsip ta'awun*, *Prinsip kesetaraan antar umat*.

**Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat , Pertanian, Ekonomi Islam**

## **ABSTRACT**

*Sekincausub-district is the 4 largest vegetable producing sub-district in West Lampung Regency, with quite a large land area. However, the farmers there experience obstacles in agricultural management such as not having land, understanding good techniques in agricultural management in order to get satisfactory results. The formulation of this research problem is how to implement and impact community economic empowerment in agricultural management through institutional development from an Islamic perspective. The aim of this research is to determine the implementation and impact of community economic empowerment in agricultural management through institutional development from an Islamic perspective.*

*This type of research is qualitative field research, with data collection methods using interviews, observation and documentation. The population in this study were farmers in the UPBS Sekincau area, 33 farmers and 4 UPBS Sekincau staff, with staff and farmer informants in the institutional area.*

*The result of this analysis is that the implementation of community economic empowerment in agricultural management through institutional development has been successfully implemented and has had a significant impact with several obstacles that must be addressed by the government. Furthermore, community economic empowerment in agricultural management through institutional development on community welfare has a positive impact because welfare indicators are achieved, namely monthly income, unemployment rates, and farmers' investment/savings. The policy of community economic empowerment in agricultural management through institutional development from an Islamic economic perspective has a positive impact on the entire community as evidenced by the achievement of human needs in maqasyid sharia, namely dharuriyah needs, al-hajiyah needs and Tahsiniah needs, in its empowerment it has applied the principles of Islamic Economic empowerment, namely : Principle of Brotherhood, Principle of Ta'awun, Principle of equality between people.*

**Keywords:** *Community Empowerment, Agriculture, Islamic Economics*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl Letkol. Hl. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

## PERNYATAAN

*Assalamualaikum wr.wb*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Andi Febrin  
**Npm** : 2051010287  
**Fakultas** : Ekonomi Dan Bisnis  
**Jurusan** : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disbut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila dilam waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung , Mei 2024  
Penyusun



*Andi Febrin*  
**Andi Febrin**  
2051010287



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Leikol. Hl. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289.  
Bandar Lampung*

**PERSETUJUAN**

**Judul : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM  
PENGELOLAAN PERTINIAN MELALUI PENGEMBANGAN  
KELEMBAGAAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM (STUDI PADA KAWASAN UNIT PRODUKSI BENIH  
SAYURAN KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT)**  
**Nama : Andi Febrian**  
**Npm : 2051010287**  
**Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis**  
**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Raden Intan  
Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Budimansyah, S.Th.i.M.Kom.I**

**Adib Fachri, M.E.Sy**

**NIP.197707252002121001**

**NIP.198910302019031013**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Dr. Erke Anggrani, M.E.Sy**

**NIP.198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl Letkol. Hj. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289,  
Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

Skripsi, dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”, oleh : Andi Febrian, NPM : 2051010287  
“Program Studi Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024, Waktu : 15.00-16.30 WIB, Tempat : Ruang Sidang Gedung A.23.

**TIM PENGUJI**

Ketua : Ujang Hanief Musthofa, M.S.I

Sekretaris : Erlin Kurniati, M.M

Penguji I : Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I.

Penguji II : Dr. Budimansyah, S.Th., I.M. Kom. I

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M, Akt., C.A.

NIP. 19700926200811008

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.."*

**(Q.S Al-Insyirah (94) : 5-6)**

*"Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah  
milik mereka yang senantiasa berusaha. "*

**( B.J Habibie )**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka penulis persembahkan skripsi ini pada:

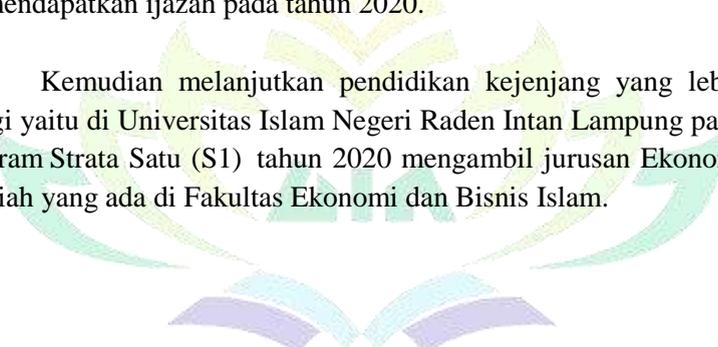
1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Efendi dan Ibu Suarni yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, ketika dunia menutup pintunya padaku, Bapak dan Ibu membuka lengannya untukku. Ketika orang-orang menutup telinga, mereka berdua membuka hati untukku. Terimakasih Bapak dan Ibu yang telah mengusahakan segala cara agar anakmu ini selesai dalam pendidikan ini, terimakasih atas segala nikmat yang telah engkau berikan selama ini, besar harapanku untuk dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan.
2. Untuk ayuk dan kakakku Nurhana, Herlina, Dan Edi Irawan yang selalu memberikan motivasi serta memberikan segala yang terbaik berupa dukungan sepenuhnya untuk menggapai segala mimpi dan cita-cita, terimakasih atas semua doa yang tulus dan tak ternilai sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk Bapak Surya, Ibu Ghinah, Putra dan ayuk lina beserta keluarga besar saya mengucapkan terimakasih karna saya sudah diterima dan diperlakukan dengan baik dikeluarga dan sudah dianggap menjadi bagian keluarga kalian.
4. Untuk sahabatku Axzara, Anisa, dan Elsa terimakasih sudah menjadi support system terbaik ketika lelah dengan perskripsian ini, terimakasih sudah mendengarkan misah-misuh diriku setiap hari.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Andi Febrian yang dilahirkan di di desa Bukit Kemuning pada tanggal 08 februari 2002, merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Efendi dan Ibu Suarni. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah:

1. SDN 01 Giham Suka Maju kabupaten Lampung Barat dan mendapatkan ijazah pada tahun 2014.
2. SMPN 01 Sekincau kabupaten Lampung Barat tamat dan mendapatkan ijazah pada tahun 2017.
3. SMAN 01 Sekincau kabupaten Lampung Barat tamat dan mendapatkan ijazah pada tahun 2020.

Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program Strata Satu (S1) tahun 2020 mengambil jurusan Ekonomi Syariah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas karunia dan nikmat-Nya yang di berikan kepada kita. Shalawat teriring salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menuntun umatnya dari zaman kegelapan sampai pada zaman yang terang benderang semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak amin.

Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah (ES) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini, rasa hormat dan terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto.,M.M,Akt.,C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung .
2. Dr.Erike Anggraeni.,M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung .
3. Dr. Budimansyah, S.Th.i, M.Kom.I selaku Pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dengan ikhlas dan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Adib Fachri, M.E.Sy selaku Pembimbing II yang telah memberikan semangat tak henti-hentinya bagi penulis, bimbingan dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Pegawai dan Staff Karyawan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
6. Seluruh aparatur dan staff Unit Produksi Benih Sayuran Sekincau,para petani yang ada dikawasan UPBS , dan seluruh

masyarakat Desa Sekincauyang tak bisa disebutkan satu persatu yang sudah bersedia direpotkan oleh penulis dan menjadi narasumber dalam skripsi ini.

7. Sahabat perjuangan khususnya kelas E Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang selalu bersama saat proses perkuliahan serta memberikan semangat dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi.
8. Teman-teman kkn dan masyarakat dan aparatur desa jati indah yang terlibat dan sudah menemani selama proses kkn ditanjung bintang dilaksanakan.
9. Almamaterku tercinta, Ekonomi Syariah (ES) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan tempat dalam menuntut ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya.

Tidak ada lagi yang bisa penulis haturkan kecuali doa untuk semua dan diruang rindulah kita bertemu. Semoga Allah SWT membalas ketulusan hati mereka dengan berlipat ganda. Akhirul Kalam, dengan penuh Ikhtiar dan rendah hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa diharapkan. Semoga bermanfaat bagi pengembang keilmuan.

*Wassalamulaikum warrahmatullah wabarakatuh*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

**Bandar Lampung, 11 Juli  
2024**

**Penulis**

**Andi Febrian**

**Npm.2051010287**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	15
D. Rumusan Masalah .....	16
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Manfaat Penelitian.....	17
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	17
H. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	23
2. Sumber Data.....	24
3. Populasi dan sampel.....	24
4. Metode Pengumpulan Data .....	26
5. Teknik Analisis Data.....	28
I. Sistematika Penulisan.....	29

## **BAB II**

<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>31</b>
A. Pemberdayaan Masyarakat.....	31
1. Definisi Pemberdayaan masyarakat .....	32
2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Islam.....	45
B. Pengelolaan Pertanian .....	52
1. Definisi Pertanian.....	52
2. Pertanian Menurut Islam .....	54
C. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi .....	56
1. Definisi Kelembagaan Ekonomi .....	56
2. Kelembagaan Ekonomi Pertanian .....	59
3. Kelembagaan ekonomi menurut islam.....	62
D. Teori Ekonomi Islam.....	<b>65</b>
1. Definisi Ekonomi Islam .....	65
2. Nilai dan Prinsip Ekonomi Islam .....	67
3. Karakteristik Ekonomi Islam .....	69
4. Dasar Hukum Ekonomi Islam.....	70

## **BAB III**

<b>DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	<b>73</b>
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran Sekincau (UPBS) .....	82

## **BAB IV**

<b>ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>97</b>
A. Implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan pertanian melalui pengembangan kelembagaan. ....	97
1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan pertanian melalui pengembangan kelembagaan Unit Produksi Benih Sayuran Sekincau .....	97
2. Dampak Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. ....	115

3.Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan.....	122
4.Indikator kesejahteraan masyarakat menurut islam .....	129
<b>BAB V</b>	
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran dan Rekomendasi .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Jumlah Hasil Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman Di kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, 2022. ...	5
<b>Tabel 1.2</b> Luas Lahan Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman Di kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, 2022. ...	7
<b>Tabel 3.1</b> Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Sekincau Tahun 2022 .....	74
<b>Tabel 3.2</b> Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sekincau Tahun 2022.....	76
<b>Tabel 3.3</b> Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa/Kelurahan di Kecamatan Sekincau Tahun 2022 .....	77
<b>Tabel 3.4</b> Jumlah Kepala Kelurga Desa/Kelurahan Di Kecamatan Sekincau Tahun 2022 .....	77
<b>Tabel 3.5</b> Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Sekincau Tahun 2022. ....	78
<b>Tabel 3.6</b> Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Sekincau, 2021/2022 dan 2022/2023. ....	79
<b>Tabel 3.7</b> Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Sekincau, 2020–2022.....	80
<b>Tabel 3.8</b> Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim .....	81
<b>Tabel 3.9</b> Daftar nama masyarakat pemberdayaan ekonomi masyarakat.....	85
<b>Tabel 3.10</b> Struktur Manajemen UPB Tanaman Sayuran Sekincau ..	86
<b>Tabel 3.11</b> Jumlah Karyawan UPB Tanaman Sayuran Sekincau .....	86
<b>Tabel 3.12</b> Harga sewa lahan dikawasan unit produksi benih sayuran Sekincau .....	88
<b>Tabel 3.13</b> Harga Sewa Alat Traktor Bajak Unit Produksi Benih Sayuran Sekincau .....	89
<b>Tabel 3.14</b> Upah Buruh Karyawan Borongan/ Harian Unit Produksi Benih Sayuran Sekincau.....	89

<b>Tabel 4.1</b> Jenis,Lahan,Waktu Dan Hasil Panen kegiatan pertanian sebelum melalui teknik tumpang sari.....	103
<b>Tabel 4.2</b> Jenis,Lahan,Waktu Dan Hasil Panen kegiatan pertanian sesudah melalui teknik tumpang sari.....	104
<b>Tabel 4.3</b> Pendapatan masyarakat setelah dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pertanian melalui pengembangan kelembagaan.....	118



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1.</b> Denah Kawasan Sekincau.....	75
<b>Gambar 3.2.</b> Luas Daerah menurut Desa/Kelurahan (%) Tahun 2022.....	77





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai langkah awal untuk untuk memperjelas proposal ini, peneliti akan menguraikan terlebih dahulu mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian ini berjudul **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”**. Guna memudahkan dan menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami makna dari judul tersebut maka perlu penegasan serta memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini.

#### **1. Pemberdayaan**

Pemberdayaan memiliki makna memberikan daya upaya atau kekuatan kepada kelompok marjinal, kelompok yang berada pada garis kemiskinan (ketidak berdayaan), kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

#### **2. Pengelolaan Pertanian**

adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan hasil pertanian dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Pengelolaan pertanian mencakup berbagai aspek, seperti pengendalian hama dan penyakit, pengolahan lahan, pengelolaan lingkungan, pengumpulan dan pengelolaan data, dan lain-lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rochmah, Hidayati Fatchur, Aliyyu Sheva Kresnanda, and Muhammad Luthfi Asyidiq. "Pemanfaatan Limbah Ampas Kopi sebagai Upaya Pemberdayaan Petani Kopi di CV Frinsa Agrolestari, Bandung, Jawa Barat." *Jurnal Sains Terapan: Wahana Informasi dan Alih Teknologi Pertanian* 11.2 (2021): 60-69.

<sup>2</sup> Naik Sinukaban, "Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Hidrolitan Vol 1* 1, no. pertanian (2010): 1–9.

### 3. Pengembangan

Pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Perubahan lembaga terjadi karena interaksi antara organisasi dan lembaga. Individu dan organisasi bersaing untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang disajikan dalam struktur kelembagaan yang ada.<sup>3</sup>

### 4. Kelembagaan

Kelembagaan (*Institution*) sebagai aturan main (*Rule Of Game*) dan organisasi, berperan penting dalam mengatur penggunaan/alokasi sumberdaya secara efisien, merata dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

### 5. Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam atau ekonomi berbasis syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi syariah berpedoman penuh pada alqur'an dan as-sunnah. Karena syariah Islam dimana didalamnya termasuk ekonomi dan keuangan syariah diturunkan Allah swt untuk seluruh manusia bahkan untuk sekalian alam. Keuniversalan ekonomi dan keuangan syariah membuka peluang yang luas bagi umat lain yang ingin menerapkan sistem ekonomi mereka dengan pola syariah.

Berdasarkan pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah Penelitian secara ilmiah tentang bagaimana implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan pertanian melalui pengembangan kelembagaan

---

<sup>3</sup> I Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif-Rajawali Pers*, 2 ed. (PT. RajaGrafindo Persada, 2021) 266.

<sup>4</sup> Aidilof, "Kebijakan Kelembagaan Pada Usaha Sapi Perah Di Provinsi Aceh," *Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa* 47 (2016): 1–11, <https://media.neliti.com/media/publications/290590-kebijakan-kelembagaan-pada-usaha-sapi-pe-3d465db8.pdf>.

desa pada kawasan Unit Produksi Benih sayuran yang ada di ,kecamatan sekinjau,kabupaten Lampung Barat.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Sejak zaman dahulu Indonesia dikenal dengan negara agraris, negara agraris adalah negara yang sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani atau bergantung pada sektor pertanian dengan berjalannya waktu petani di Indonesia semakin berkurang terutama di kota-kota besar selain karena alih fungsi lahan bekerja di luar sektor pertanian dianggap lebih menghasilkan pendapatan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bekerja sebagai petani namun di beberapa daerah sektor pertanian masih menjadi primadona dan masih menjadi sumber penghasilan. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan pertanian berkelanjutan membutuhkan peran sumber daya manusia yang berkualitas dan komitmen kuat dalam pembangunan sektor pertanian. Dua hal tersebut nantinya dijadikan tumpuan dalam keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan. Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk kita tergantung padanya.<sup>5</sup>

Pertanian dimasa depan, menghadapi era revolusi industri, kita ditopang oleh penggunaan mesin-mesin otomatis dan sudah terintegrasi dengan jaringan internet yang baik, hal ini lebih memudahkan untuk promosi, mengembangkan pertanian, dan mencari sumber pembelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan utamanya pada bidang pertanian.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Lukman Adining Saputra and Martien Herna Susanti, "Peran Omah Tani Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Petani Di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang," *UCEJ: Unnes Civic Education Journal* 3, no. 2 (2014): 34–40, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej>.

<sup>6</sup> Salamah, Umi, "Kontribusi Generasi Muda Dalam Pertanian Indonesia". *Journal Science Innovation and Technology* ,(2021). 1. 23-31. 10.47701/sintech.v1i2.1064.

Lampung Barat adalah kabupaten di provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kotanya adalah di liwa, bagian dari kecamatan Balik Bukit. Kabupaten Lampung Barat memiliki banyak potensi sosial ekonomi di berbagai bidang. Salah satunya sektor pertanian dengan komoditi sayuran. Dilihat dari kontur alam pegunungan dan cuaca yang sejuk menjadikan kabupaten lambar menjadi satu satunya daerah dengan penghasil sayur-mayur terbesar di provinsi Lampung.kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten penghasil sayur mayur terbesar di provinsi Lampung. Ada empat kecamatan yang merupakan penghasil sayuran terbesar di kabupaten Lampung Barat, yaitu kecamatan Way Tenong, Sekincau, Balik Bukit, Dan Sukau.keempat kecamatan ini telah menyuplai beberapa jenis sayuran antara lain kentang, cabai merah, kubis, labu siam, tomat, wortel, buncis, dan sawi dengan luas panen dan jumlah produksi makin meningkat dari tahun ke tahun. Ditambah lagi dengan daya dukung dan perhatian pemerintah kabupaten Lampung Barat begitu besar, sehingga kabupaten Lampung Barat mampu menjadi pendistribusi sayur-mayur ke daerah–daerah lain seperti bandar Lampung, sumatera selatan, jambi, bengkulu, padang, dan mulai juga menyuplai sebagian jabotabek.<sup>7</sup>

Lampung Barat memiliki luas lahan pertanian kurang lebih 10.465 hektare yang mana ini merupakan luas yang cukup untuk bercocok tani. Namun tidak semua petani memiliki lahan yang luas, disinilah petani dituntut untuk bagaimana caranya dengan lahan yang sedikit bahkan tidak memiliki sama sekali tetapi bisa tetap bercocok tanam dan menghasilkan penghasilan. Potensi sosial ekonomi adalah kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Potensi sosial ekonomi dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti sumber daya alam, infrastruktur, sumber daya manusia, dst.

---

<sup>7</sup> Rugayah, “Sinergi Budidaya Buah Dan Sayuran Berkelanjutan Dalam Era Perubahan Iklim Di Kelompok Tani Bina Usaha Pekon Giham Sukamaju Kecamatan SekincauLampung Barat,” *Jurnal Sinergi* 1, no. 1 (2020): 95–105, <https://doi.org/10.23960/jsi.v1i1.14>.

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menguasai struktur ekonomi kabupaten Lampung Barat. Bersama-sama dengan sektor kehutanan dan perikanan, ketiganya mampu memberikan kontribusi sampai dengan 46,23 persen terhadap total pdrb tahun 2022. Pada tahun 2022, Produksi padi meningkat menjadi 65.432,93 ton dari sebelumnya sebesar 60.665,89 ton pada tahun 2021. Hal ini bertolak belakang dengan produktivitas tanaman padi yang menurun menjadi 47,60 ku/ha dari 49,31 ku/ha pada tahun 2022. Beberapa produksi tanaman sayuran mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021. Pada sub sektor perkebunan, kopi menjadi tanaman yang paling banyak dihasilkan pada tahun 2022.<sup>8</sup>

**Tabel 1.1.**

Jumlah Hasil Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman Di kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, 2022.

Jenis Tanaman <i>Kind of Plants</i>	2019	2020	2021	2022
Bawang Daun	815.00	-	-	420.00
Bawang Merah	996.00	3,050.00	-	-
Bawang Putih	380.00	1,963.00	75.00	-
Kembang Kol	-	-	-	-
Kentang	1,584.00	11,540.00	470.00	450.00
Kubis	400.00	-	-	-
Petsai/Sawi	1,800.00	10,160.00	655.00	1,165.00
Wortel	-	-	-	-
Bayam	-	-	-	-
Buncis	669.00	2,871.00	495.00	886.00

<sup>8</sup> Lampung Barat, *Indeks Pembangunan Manusia, and Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah*, 1 ed. (Pembangunan Manusia 8, 2023) 24.

		0	0	0
Cabai Besar	796.00	5,560.0 0	515.0 0	540.0 0
Cabai Keriting	-	-	-	150.0 0
Cabai Rawit	80.00	-	-	75.00

Sumber Data : Badan Stastik Kecamatan Sekincau

Pada tahun 2022, produksi tanaman sayuran dan buah-buahan yang paling banyak diusahakan penduduk di Kecamatan Sekincau antara lain Tomat, Petsai/Sawi dan Buncis dengan masing-masing produksi tanaman sebesar 1.360, 1.165 dan 886 kuintal. Sementara itu, tanaman perkebunan yang paling banyak dihasilkan di Kecamatan Sekincau pada tahun 2022 adalah Pisang dan Alpukat dengan total masing-masing produksi tanaman sebesar 156 dan 121 kuintal.

Namun petani cenderung bekerja secara mandiri dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya modal lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>10</sup> Hal tersebut yang mengakibatkan posisi tawar petani (bargaining position) sangat lemah sehingga rentan mengalami krisis pangan. Ditambah lagi, kegiatan yang dilakukan oleh petani menunjukkan produktif yang rendah, sedangkan generasi muda petani lebih menyukai bekerja di sektor non-pertanian. Dengan demikian, diharapkan kehadiran kelembagaan petani mampu membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerahnya.

Dalam kegiatan pertanian yang ada di kecamatan Sekincau, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat petani dalam usaha bercocok tanam sayuran. Berikut adalah beberapa faktor yang relevan:

1. Lahan: Ketersediaan lahan yang terbatas dapat menjadi hambatan bagi petani. Jika lahan tidak cukup luas, produksi sayuran juga akan terbatas.

<sup>9</sup> Sumber Data : Badan Stastik Kecamatan Sekincau

<sup>10</sup> Rofinus N Wuli, "Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian Untuk Menciptakan Petani Unggul Demi Mencapai Ketahanan Pangan," *Jurnal Pertanian Unggul 2*, no. 1 (2023): 1–15.

2. Fasilitas: kurangnya fasilitas yang menunjang pertanian, seperti traktor pembajak dan alat pemompa air
3. Benih: Kualitas benih yang buruk atau keterbatasan akses terhadap benih berkualitas dapat mempengaruhi hasil panen dan juga harga benih yang relatif cukup mahal.
4. Pupuk: Ketersediaan pupuk yang memadai dan pemahaman tentang penggunaan pupuk yang benar juga memainkan peran penting dalam produksi sayuran.<sup>11</sup>
5. Tenaga Kerja: Kurangnya tenaga kerja atau keterbatasan dalam mempekerjakan pekerja dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas pertanian.
6. Penyuluhan/ sosialisasi : kurangnya sosialisasi bagaimana pentingnya teknik dan cara pemilihan benih, pupuk, atau pun alat penunjang pertanian lainnya.

**Tabel 1.2.**

Luas Lahan Produksi Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman Di kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, 2022.

<b>Jenis Tanaman</b> <i>Kind of Plants</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bawang Daun	13.00	-	-	4.50
Bawang Merah	25.00	28.00	-	-
Bawang Putih	12.00	17.00	1.00	-
Kembang Kol	-	-	-	-
Kentang	13.00	40.00	5.00	2.00
Kubis	1.00	-	-	-
Petsai/Sawi	27.00	57.00	13.00	13.00
Wortel	-	-	-	-
Bayam	-	-	-	-
Buncis	22.00	43.00	12.00	16.50
Cabai Besar/ TW / Teropong	32.00	62.00	14.00	9.00
Cabai Keriting	-	-	-	1.50

<sup>11</sup> Hasil wawancara terstruktur dengan kepala upbs.

Cabai Rawit	5.00	-	-	4.00
-------------	------	---	---	------

Sumber Data : Badan Stastik Kecamatan Sekincau

Dari besarnya lahan yang ditanami masyarakat disekitar kawasan lembaga hanya sekitar 40% saja yang hanya memiliki lahan sendiri yang mana mereka hanya menjadi buruh harian kepada orang yang mempunyai lahan.<sup>12</sup> Dikutip dari hasil wawancara salah satu staff yang ada didinas UPB Sayuran Sekincaumengatakan bahwasannya masyarakat yang ada disekitar kawasan mengalami kesulitan dalam kegiatan bertani salah satunya tidak adanya lahan milik pribadi dan mahalnya harga sewa alat berat untuk membajak,kemudian ia juga menambahkan bahwa kurangnya wawasan tentang teknik penanaman dan pemilihan benih yang berkualitas untuk menghasilkan hasil yang memuaskan. Hal ini yang membuat kelembagaan untuk bergerak memberdayakan masyarakat sekitar dengan penyewaaan lahan pemberian sewa fasilitas dengan harga terjangkau dan pemberian fasilitas lain seperti penyediaan perairan bagi petani untuk pengairan.<sup>13</sup>

Selain faktor diatas faktor keberadaan tengkulak erat terkait dengan kegiatan pertanian di pedesaan. Mereka yang membeli hasil panen petani, seperti sayur,dan hasil bumi yang lain disebut tengkulak. Selain berperan sebagai pembeli, tengkulak juga membantu petani dengan modal. Petani tergantung pada tengkulak karena banyaknya pekerjaan mereka. Karena adanya hubungan sosial yang bersifat solidaritas dan bersimbiosis, petani tidak dapat keluar dari ikatan tersebut. Selain itu, tengkulak sangat penting karena berhubungan dengan banyak orang, mulai dari petani hingga pedagang. Petani tidak memiliki banyak informasi, yang membuat mendapatkan harga jual yang tinggi menjadi sulit karena ketergantungan ini.

Keberadaan tengkulak erat terkait dengan kegiatan pertanian di pedesaan. Mereka yang membeli hasil panen petani, seperti sayur dan palawija, disebut tengkulak. Selain berperan sebagai pembeli, tengkulak juga membantu petani dengan modal. Petani tergantung

---

<sup>12</sup> Sumber Data : Badan Stastik Kecamatan Sekincau

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Terstruktur.

pada tengkulak karena banyaknya pekerjaan mereka. Karena adanya hubungan sosial yang bersifat solidaritas dan bersimbiosis, petani tidak dapat keluar dari ikatan tersebut. Selain itu, tengkulak sangat penting karena berhubungan dengan banyak orang, mulai dari petani hingga pedagang. Petani tidak memiliki banyak informasi, yang membuat mendapatkan harga jual yang tinggi menjadi sulit karena ketergantungan ini. Beberapa alasan mengapa petani menjual hasil panen mereka ke tengkulak adalah karena tengkulak dapat mengangkut dan mengurus sendiri. pemanenan hingga transportasi. Tengkulak juga mempekerjakan beberapa orang untuk pemanenan.

Petani biasanya tidak perlu memanen apa pun dari hasil panen mereka, seperti jagung dan padi, bahkan tidak perlu mengeringkannya. Setelah memanen hasil pertanian, tengkulak akan segera mengangkutnya. Selain itu, tengkulak memiliki kemampuan untuk membeli hasil panen dalam jumlah besar. Ini berhubungan dengan jaringan tengkulak yang melibatkan agen besar. Petani sangat bergantung pada tengkulak karena mereka memberi mereka modal. Dalam studi tersebut, tengkulak di Dataran Tinggi Sekincau menggunakan peran mereka sebagai pemberi modal pada petani. Tengkulak menggunakannya untuk mengikat petani agar terus menjual hasil panen mereka. Tengkulak menggunakan situasi saat panen raya atau bahkan gagal panen. Selama masa gagal panen, ketika harga hasil panen anjlok dan petani kehabisan uang untuk menanam tanaman berikutnya, tengkulak sangat memanfaatkannya. Karena tidak ada hubungan yang kuat antara petani dan tengkulak, petani tidak tahu harga pasar dan hanya bisa pasrah terhadap tengkulak. petani, juga dikenal sebagai petani, beroperasi secara ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Posisi petani dianggap sangat lemah. Sebagai petani, petani juga mengikuti etika subsistensi, yang berarti dahulukan selamat. Rata-rata, petani gurem sangat bergantung pada tengkulak, tetapi petani dengan lahan besar tidak terlalu

bergantung pada tengkulak karena mereka memiliki modal dan lahan yang cukup untuk bertahan hidup.<sup>14</sup>

Fakta bahwa petani bergantung pada tengkulak di desa menunjukkan bahwa tengkulak menawarkan bantuan dan petani berada di posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun ada manfaat dan kekurangan dari Meskipun tidak jelas apakah tengkulak benar-benar membantu petani dalam masalah keuangan mereka, jelas bahwa petani memerlukan tengkulak dalam beberapa hal. tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, tetapi juga dalam penjualan hasil panennya. Petani terus bergantung pada tengkulak karena kondisi ekonomi mereka yang buruk. Petani menghadapi biaya hidup yang tinggi dan biaya pertanian yang tinggi karena gaya hidup subsistensi mereka.<sup>15</sup>

Tak jarang pula masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk ditanami benih terpaksa menjaddi buruh harian kepada tengkulak atau masyarakat yang memiliki lahan dan pertanian, biasanya masyarakat yang memiliki lahan yang luas meminta kepada masyarakat untuk membantu memanen atau pun dijadikan buruh paroan.biasanya mereka akan menyediakan semuanya masyarakat hanya diperlukan tenaganya saja dan di upah harian,adapun masalah disini adalah tak jarang banyak boss sayur yang tidak mengupah dengan standar yang menjadikan hal ini masyarakat menjadi kurang dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>16</sup>

Semua faktor ini perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik agar petani dapat mengatasi hambatan dan meningkatkan hasil panen sayuran di kecamatan Sekincau. Peran penting kelembagaan dalam ekonomi adalah sebagai sarana untuk menurunkan ketidak pastian

---

<sup>14</sup> L. U. Herdinawati, "Alasan Petani Muslim Menjual Hasil Panen Kepada Tengkulak Di Desa," *Researchgate*, no. July 2014 (2017), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31089.07521>.

<sup>15</sup> Wawan Agu, Farid Th. Musa, and Funco Tanipu, "Eksistensi Tengkulak Dalam Menunjang Perekonomian Petani Jagung Di Desa Juriya, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo," *Dynamics of Rural Society Journal* 1, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.37905/drsj.v1i1.6>.

<sup>16</sup> Bagus Galih Satriyo, Muhammad Iqbal Fasa, and Adib Fachri, "*JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*" 8, no. 1 (2022): 99–108, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jimfe/index>.

atau mengubahnya menjadi resiko. Turunnya ketidak-pastian membuat biaya transaksi menjadi lebih rendah, sehingga transaksi pasar atau perdagangan akan meningkat. kegiatan ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat dan cara pemecahan masalahnya dengan memperhatikan potensi yang ada di lingkungannya. Sebagaimana telah dipahami bersama bahwa perdagangan memberikan keuntungan bagi pelakunya, karena memungkinkan mereka untuk spesialisasi. Spesialisasi akan meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat dan aktivitas ekonomi kelembagaan dapat membantu masyarakat dalam berbagai hal, seperti mengidentifikasi masalah yang dihadapi, merencanakan solusi, dan melaksanakan program-program yang bermanfaat. Pada era teknologi yang terus berkembang pesat ini, digital marketing telah menjadi salah satu alternatif pemasaran yang terus berkembang. Banyak bisnis telah beralih dari pemasaran tradisional (Offline Marketing) ke digital marketing, yang menawarkan menghemat uang dan energi. Sebaliknya, konsumen mulai menyadari bahwa digitalisasi akan mengubah cara mereka mengonsumsi barang. Pemasaran digital memudahkan mereka untuk mengetahui berbagai produk yang tersedia.

Potensi pembangunan manusia dapat diwujudkan melalui kegiatan pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan & Pemberdayaan Petani pada Pasal 1 Ayat 2 tertulis pengertian pemberdayaan petani yang berbunyi “pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani”. Petani perlu diberikan perlindungan serta pemberdayaan supaya petani memiliki kapasitas untuk terus tumbuh

dan berkembang menjadi lebih sejahtera.<sup>17</sup> Dalam pemberdayaan ini masyarakat perlu indikator yang membantu mereka seperti contohnya kelembagaan ekonomi, yang mana kelembagaan ini berfungsi sebagai wadah/tempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Pemberdayaan harus menanamkan kemandirian pada diri masyarakat yang diberdayakan. Hal ini guna menghindari tumbuhnya ketergantungan pada pemerintah atau organisasi yang melaksanakan pemberdayaan. Masyarakat yang diberdayakan lebih mengetahui potensi dan kebutuhan mereka sehingga mereka bisa mengelola pelaksanaan pemberdayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat yang diberdayakan sepatutnya membentuk sendiri sebuah organisasi yang mengarahkan dan memandu jalannya pemberdayaan. Menyerahkan kontrol pelaksanaan pemberdayaan kepada pihak luar dapat menimbulkan ketergantungan dan justru mengganggu penanaman daya yang diinginkan. Langkah ini telah ditegaskan Allah dalam al quran :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يُعَذِّبُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

---

<sup>17</sup> Lifa Indri Astuti, Hermawan, and Mochammad Rozikin, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan," *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 3, no. 11 (2015): 1886–92, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1061>.

*"Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (Q.S Ar-Ra'd · Ayat 11).*

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan dan martabat suatu masyarakat, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri.<sup>18</sup> Manusia diminta untuk berusaha meningkatkan kompetensi dan bekerja keras demi mengubah nasib mereka sendiri. Ayat ini juga mendorong kemandirian dalam jiwa masyarakat. Tujuan pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat dan komunitas penerima program pemberdayaan mampu mengubah nasib mereka dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Derajat keberdayaan yang pertama adalah kesadaran dan keinginan untuk berubah. Tanpa keinginan untuk memperbaiki diri, masyarakat akan sulit untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Proses pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mampu menjaga lingkungan. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan masyarakat dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik dari segi pendidikan dan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melibatkan proses di mana masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan sumber daya, didukung agar dapat meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Ilmu dan keterampilan merupakan salah satu faktor naiknya taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan berbasis pembinaan dan pendidikan ketrampilan mutlak perlu dilakukan. dalam hal ini kelembagaan yang dimaksud dalam membantu petani di kawasan Lampung Barat adalah Unit Produksi Benih Sayuran yang berada di jl. Lintas liwa no. 418, Giham Sukamaju, Kec. Sekincau,

---

<sup>18</sup> Sany, U ." Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an". *Jurnal Ilmu Dakwah*, (2019) .39(1), 32-44.

Lampung Barat. Seperti diketahui tugas pokok UPB Sayuran menerapkan dan menyebarluaskan teknologi pembenihan, menyediakan dan menyalurkan benih yang bermutu. Termasuk menerapkan metode lapangan dari hasil penelitian teknologi pembenihan baru yang baik untuk budidaya, menyebarluaskan teknologi pembenihan benih yang lebih menguntungkan, menyediakan dan menyebarkan jenis benih yang baik untuk budidaya dari ukuran benih sampai induk, menyediakan dan menyalurkan benih yang bermutu secara kontinyu.<sup>19</sup>

Jadi UPB mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan produksi benih dalam jumlah dan mutu. Unit Produksi Benih Sayuran sekincau, Kabupaten Lampung Barat, yang berada dibawah naungan provinsi Lampung dalam satu tahun harus mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar rp 60 juta. Dengan memanfaatkan lahan garapan seluas empat hektar. Namun pengelola mengalami kesulitan dalam mencapai target tersebut karena pemerintah hanya menyediakan 6000 benih tanaman. UPB Sayuran juga memiliki beberapa bertugas dan peran dalam memberdayakan masyarakat yang ada disekitar kawasan pertanian.berikut beberapa tugas dan peran UPB Sayuran :

- a) melaksanakan penyiapan benih sumber dan benih bermutu hortikultura serta melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan teknis budidaya lahan kering.
- b) Menyewakan lahan kepada petani untuk pengelolaan pertanian, seperti menanam sayuran dan lain sebagainya
- c) Memperkerjakan buruh lepas harian ketika panen raya tiba
- d) Memfasilitasi media perairan keppadda para penyewa lahan untuk media pengairan tanaman petani
- e) Memberikan jasa untuk membantu petani seperti jasa bajak dengan traktor sebelum dan sesudah pasca panen raya.

Tidak dapat dipungkiri berbagai hambatan-hambatan baik dari pihak kelembagaan maupun masyarakat penerima manfaat masih

---

<sup>19</sup> Muhamad Ngaffi, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 33–47, <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>.

ditemukan dan mengganggu capaian keberhasilan yang telah direncanakan. Selain itu penelitian sebelumnya juga belum ada meneliti secara kompleks mengenai peran dan hambatan dari kelembagaan lokal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Kesenjangan antara potensi dengan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa kecamatan Sekincau, mengindikasikan kondisi ini memerlukan pemberdayaan. Keberadaan Unit Produksi Benih Sayuran Sekincau dikawasan penelitian mengerucutkan maksud dari penelitian ini. Kelembagaan lokal berperan positif dalam aktifitas pemberdayaan masyarakat. Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dengan judul "**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)**".

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat).

Sub fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan Pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
2. Dampak Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
3. Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan Pada Kawasan Unit Produksi

Benih Sayuran Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan Pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana Dampak Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?
3. Bagaimana Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan Pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan Pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk Mengetahui Dampak Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

3. Untuk Mengetahui Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertanian Melalui Pengembangan Kelembagaan Pada Kawasan Unit Produksi Benih Sayuran Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan Uin Raden Intan Lampung.
- b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang ekonomi syariah, khususnya kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam uin raden intan Lampung.
- b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai ekonomi syariah, khususnya kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Ruwanti Eka Rahayu, Lindawati Kartika. "Analisis Kelembagaan Dan Strategi Peningkatan Daya Saing Komoditas Kentang Di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah" Jurnal ilmu pertanian Indonesia (jipi), agustus 2015, vol. 20 (2), hal. 150-

157. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator kinerja utama yang menjadi prioritas dalam peningkatan daya saing komoditas kentang di kabupaten banjarnegara adalah: Jumlah petani yang memasarkan produknya di koperasipersentase peningkatan jumlah benih bersertifikat yang memenuhi kebutuhan petani kentangpersentase peningkatan produksi kentang lokal yang memenuhi permintaan pasar domestik dan eksporselain itu, strategi yang dihasilkan dari penelitian ini diterjemahkan menjadi sasaran strategis dan indikator kinerja utama (iku) yang menghasilkan 11 iku pemicu dan 13 iku hasil.<sup>20</sup>

2. Ristiana Ristiana, Amin Yusuf "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Wisata Lerep" Hasil dari artikel ini membahas tentang pemberdayaan ekonomi melalui badan usaha milik desa (bumdes) di desa wisata lerep. Artikel ini juga membahas faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi serta tahap-tahap pemberdayaan. Faktor pendukung meliputi niat dan semangat individu, potensi sumber daya alam, dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa. Sedangkan faktor penghambat meliputi minimnya sumber daya manusia yang mengerti manajemen bumdes, minimnya anggaran dana, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peran bumdes. Penulis juga menyarankan agar pengelola bumdes menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemerintah desa serta meminimalisir perbedaan pendapat.studi empiris meneliti pemberdayaan sebagai suatu proses yang meliputi empat tahap: Masukan, kemajuan, penggabungan, dan komitmen. Tahap entri dimotivasi oleh pengalaman peserta dari peristiwa atau kondisi yang mengancam diri atau keluarga.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ruwanti Eka Rahayu, Lindawati Kartika. "Analisis Kelembagaan dan Srtategi Peningkatan Daya Saing Komoditas Kentang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah" *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Agustus 2015, Vol. 20 (2), hal. 150-157.

<sup>21</sup> Neneng Rini Ismawati, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)," *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 6, no. 1 (2020): 91, <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v6i1.4250>.

Perbedaan dengan jurnal sebelumnya terletak pada fokus penelitian yang lebih spesifik, yaitu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa di Desa Wisata Lerep . Sedangkan jurnal sebelumnya lebih umum membahas kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat

3. Zesty Ardinal Barlan "Analisis Peran Kelembagaan Lokal Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Pedesaan Multietnis Di Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara" Hasil penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang kelembagaan politik dan kelembagaan somatik, serta konsep etnis dalam ilmu sosial di kecamatan bonegunu kabupaten buton utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelembagaan adat dan kelembagaan ekonomi di kecamatan tersebut, serta kondisi ekonomi masyarakat pedesaan yang belum optimal. Kondisi ekonomi petani di kecamatan bonegunu kabupaten buton utara belum baik karena kurangnya saluran irigasi yang memadai. Masyarakat memanfaatkan modal sosial dan hubungan kekerabatan untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan membentuk kelompok tani dan koperasi simpan-pinjam. Mekanisme peminjaman dan pengembalian uang berjalan lancar, dan lembaga ekonomi lokal seperti kud dan uep juga memberikan penguatan modal kepada petani. Kelembagaan ekonomi ini berjalan dengan baik dan efektif sebagai jaringan pengaman ekonomi pertama pada masyarakat di kecamatan bonegunu. Potensi sawah yang tinggi belum termanfaatkan dengan baik, namun peran kelembagaan lokal sangat penting dalam membantu perekonomian masyarakat. Saran diberikan untuk penelitian lebih lanjut dan pengakuan dari pemerintah terkait eksistensi kelembagaan lokal.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Zesty Ardinal Barlan, "Analisis Peran Kelembagaan Lokal Terhadap Kondisi" *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2, no. April (2018): 147–54.

Sementara itu, jurnal sebelumnya membahas tentang proses peminjaman uang di kelompok tani, KUD, UEP, dan LEP di Kecamatan Bonegunu. Penelitian ini menyoroti sistem peminjaman dan pengembalian uang, serta peran modal sosial dan hubungan kekerabatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal ini juga menekankan pentingnya lembaga ekonomi lokal dalam membantu perekonomian masyarakat, terutama petani, dengan memanfaatkan potensi sawah yang tinggi namun belum termanfaatkan dengan baik.

4. Kateria Fitriska "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara" Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) belum berjalan dengan maksimal di desa lancang kuning, kecamatan bintang utara. Meskipun bumdes bertujuan untuk mengelola potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa serta masyarakat desa, implementasi strategi tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai tujuan tersebut secara efektif. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang tantangan dan kendala dalam pelaksanaan strategi pengembangan bumdes di kabupaten bintang.

Perbedaan dengan judul sebelumnya adalah bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintang Utara belum berjalan dengan maksimal dan masih menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan efektifnya. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang kendala dalam pelaksanaan strategi pengembangan BUMDes di Kabupaten Bintang. Sedangkan judul sebelumnya membahas Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintang Utara.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Supardi, Etha & Budiwitjaksono, Gideon. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli

5. Swapradinta, Navalino, Dan Jupriyanto "Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Dalam Pengembangan Desa Wisata Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah" Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam pdf "Kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata", ditemukan bahwa kelembagaan ekonomi memainkan peran penting dalam pengembangan desa wisata. Struktur kelembagaan yang digunakan dalam desa wisata telah menggambarkan program dan tujuan pengembangan desa wisata. Selain itu, kapasitas kelembagaan ekonomi telah menunjukkan kompetensi yang optimal dalam pengelolaan potensi wisata, serta kompetensi pokdarwis dalam memanfaatkan potensi lokal. Hal ini meliputi kekayaan alam yang didukung oleh sarana dan prasarana yang sudah maksimal, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kapasitas untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah .selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pengembangan desa wisata dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah. Potensi wisata yang dapat dikembangkan dalam desa wisata masih terbatas pada kebudayaan dan pengelolaan homestay. Oleh karena itu, rekomendasi yang disampaikan adalah untuk mengembangkan pengelolaan desa wisata dengan mencontoh prototipe desa wisata yang sudah berkembang, dikelola oleh bumdes, serta menciptakan unit-unit usaha baru yang berkembang menjadi lembaga ekonomi .dalam konteks ini, penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan tingkat kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata. <sup>24</sup> Metode penelitian ini melibatkan wawancara, pengamatan, dan penggunaan dokumen yang ada, dengan fokus utama untuk memahami bagaimana bentuk kelembagaan

---

Desa Di Desa Bungurasih. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*. 4. 139. 10.35914/jemma.v4i2.733.

<sup>24</sup> Kurnia Dewi Swapradinta, Djoko Andreas Navalino, and Jupriyanto, "Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Dalam Pengembangan Desa Wisata Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Ekonomi Pertahanan* 5, no. 2 (2019): 253–68.

ekonomi dan kapasitasnya dalam desa wisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap produktivitas dalam mewujudkan ketahanan ekonomi daerah. Dengan demikian, pengembangan desa wisata membutuhkan strategi yang komprehensif, termasuk pengelolaan kelembagaan ekonomi yang optimal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan potensi wisata secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah.

Perbedaan dengan jurnal sebelumnya adalah bahwa jurnal sebelumnya membahas tentang kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata di Desa Tembi, Kabupaten Bantul, sedangkan pertanyaan terbaru mengenai kebijakan strategis Kementerian Pariwisata terkait pengembangan desa wisata, pemberdayaan masyarakat setempat, dan pengaruh kapasitas kelembagaan ekonomi serta struktur kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata secara umum.

Berdasarkan beberapa kajian jurnal yang mendukung penelitian ini terdapat beberapa perbedaan antara lain: Lokasi yang diteliti, lembaga yang diteliti merupakan lembaga yang merupakan program pemerintah dibawah anggaran APBD, bagaimana cara lembaga ekonomi dalam menerapkan pemberdayaan masyarakat yang ada dikawasan Unit Produksi Benih Sayuran.

## **H. Metode Penelitian**

Secara keseluruhan, jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut (Kirk Dan Miller) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Menurut (David William) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. 1 ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1988) 544.

Pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dimana pendekatan itu sendiri adalah persoalan yang berhubungan dengan cara orang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai disiplin ilmunya. Dibawah ini adalah uraian yang lebih rinci :

## **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah (Pendekatan terkait erat dengan pengamatan berperan serta). Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>26</sup>

### **b. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, maksudnya mencatat secara teliti segala gejala (Fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (melalui wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video tape recorder, dokumen pribadi atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain), kemudian peneliti harus membanding-bandingkan, mengombinasikan, mengabstraksikan, menarik kesimpulan.<sup>27</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari masyarakat khususnya pada kawasan Unit Produksi Benih Sayuran serta menganalisis bagaimana peran

---

<sup>26</sup> H. Ali Hardana, S.P.M.S., Dr. Budi Gautama Siregar, M.S., *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 1 ed. (Merdeka Kreasi Group:2022), 195.

<sup>27</sup> Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum I, no. 1 (2021)) hal.33–54.

pengembangannya dalam pemberdayaan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini meliputi:

### **a. Data Primer**

Adalah data dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik pelaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung.

### **b. Data Sekunder**

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti catatan dan foto yang mana data ini merupakan data yang akan menunjang data primer.

## **3. Populasi dan sampel**

### **a. Populasi**

Populasi merupakan totalitas semua nilai-nilai yang ada pada karakteristik tertentu dari sejumlah objek yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Populasi bukan hanya orang atau makhluk, tetapi juga objek dan benda yang ada di alam ini. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek/objek itu. Adapun yang akan diambil menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa yang meliputi seluruh pengurus Unit Produksi Benih Sayuran, Aparat yang memiliki peran dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berprofesi sebagai petani, dan masyarakat desa Sekincau yang terlibat maupun tidak terlibat secara langsung serta memiliki peran penting dalam proses pengembangan kelembagaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat tersebut. Populasi dalam

penelitian ini adalah petani yang ada dikawasan UPBS Sekincausebanyak 33 petani dan 4 staff UPBS Sekincau,dengan informan staff dan petani yang ada dikawasan lembaga.

## **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena keterbatasan : Dana dan tenaga serta waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.apa yang dipelajari dari sampel tersebut kesimpulannya bisa diberlakukan untuk populasi (generalisasi). Oleh sebab itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul yang refresentatif (mewakili). Untuk memudahkan penulis dalam melakukan teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan tehnik purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian.<sup>28</sup>

Kriteria informan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sejarah desa dan terlibat dalam proses pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kelompok yang terdaftar dalam struktur kepengurusan kawasan Unit Produksi Benih sayuran yang memberikan ide, serta berperan aktif dalam proses pengembangan kelembagaan ekonomi.
3. Masyarakat yang berada di kawasan Unit Produksi Benih Sayuran , merasakan dampak adanya pengembangan kelembagaan ekonomi, dan melakukan aktivitas ekonomi di sekitar desa pertanian.

---

<sup>28</sup> Bagus Sumargo, *Teknik Sampling* ,1 ed.(Unj press, 2020) 0- 388.

Dalam penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu:

**a. Informan Kunci (Key Informan)**

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua dari Unit Produksi Benih Sayuran, karyawan/staff yang ada di balai benih induk, masyarakat yang menyewa lahan dan masyarakat yang diberdayakan oleh UPB Sayuran Sekincau.<sup>29</sup>

**b. Informan Tambahan**

Yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang dapat diteliti. Informan tambahan masyarakat sekitar Unit Produksi Benih Sayuran dan anggota dari pemberdayaan masyarakat.<sup>30</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

**a. Observasi**

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-partisipan, dimana peneliti tidak terlibat, hanya mendapatkan gambaran obyeknya melalui masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan pengelolaan pertanian sejauh penglihatan dan terlepas pada saat tertentu tersebut, tidak dapat merasakan keadaan yang sesungguhnya

---

<sup>29</sup> H. Ali Hardana, S.P.M.S., Dr. Budi Gautama Siregar, M.S., *Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis*, 1 ed. (Merdeka Kreasi Group:2022), 195.

<sup>30</sup> Ibid hal., 91-92

terjadi pada observernya. Adapun yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini adalah dinas unit produksi benih sayuran sekıncau, masyarakat yang melakukan kegiatan pengelolaan pertanian. Data didapat dengan dengan cara melihat langsung bagaimana keadaan dan kegiatan yang ada di kawasan UPB Sayuran Sekıncau,dengan memperhatikan kegiatan yang dilakukan dikawasan tersebut, bagaimana teknik yang mereka lakukan dan menginggatnya untuk dijadikan bahan untuk penulisan penilian.<sup>31</sup>

#### **b. Wawancara Terstruktur**

Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.Wawancara terstruktur digunakan ketika interviewer mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada interviewee dan urutan pertanyaan tidak diubah. Dengan wawancara terstruktur lebih memprediksi kinerja seseorang atau pegawai di masa yang akan datang dibandingkan wawancara terbuka atau tidak mengarah.<sup>32</sup>Dalam penelitian ini,penulis melakukan interview atau proses tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik (langsung) kepada informan. Adapun hal-hal yang akan ditanyakan kepada staff dan masyarakat yang diberdayakan adalah bagaimana profil kelembagaan baik berupa struktur kepengurusan maupun hal-hal menarik seputar kelembagaan,kemudian bagaimana proses dan implementasi pemberdayaan itu dilakukan oleh kelembagaan,dampak terhadap perekonomian masyarakat sebelum dan sesudah diberdayakan oleh kelembagaan Unit Produksi Benih Sayuran Sekıncau,dan apakah pemberdayaan sudah menggunakan prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat islam.

#### **c. Dokumentasi**

---

<sup>31</sup> Dr. Sigit Hermawan, S.E.M.S. and Amirullah, S.E.M.M., *Metode Penelitian Bisnis*,1 ed (Media Nusa Creative :2021)272.

<sup>32</sup> R A FadhAllah, *Wawancara*,1 ed. (Unj Press, 2021) 0-60.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan video dan audio yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda tentang pendapat, teori, dalil dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>33</sup> Didalam metode ini, penulis tidak menggunakan data secara keseluruhan dari data yang terkumpul, akan tetapi hanya diambil pokok-pokok pentingnya saja dan yang lainnya adalah data pendukung analisis. Adapun data yang dibutuhkan berkenaan dengan database, foto kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan pertanian melalui pengembangan kelembagaan.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang umum dan peristiwa yang konkrit. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif.

### **a. Data Reduction**

Data reduksi artinya mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

---

<sup>33</sup> Muhammad Mujtaba Mitra Zuana, *Analisis Data Penelitian Manajemen*, (Using Dokumen , 2022 ) 133

## b. Penyajian Data

Tahap penyajian data ini digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan dan mengambil kesimpulan atau biasanya dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah inferensi yang merupakan makna terhadap data yang terkumpul dalam rangka menjawab dari suatu permasalahan.<sup>34</sup>

## c. Verifikasi Data/Pemeriksaan Simpulan

Verifikasi data simpulan merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian.<sup>35</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dibagi menjadi beberapa bab untuk memudahkan pengkajian dan pembahasan ulasan ini bagi pengkaji. Berikut sistematika pembahasan:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti membahas mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada landasan teori berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Landasan teori meliputi: pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan kelembagaan ekonomi, pengelolaan pertanian, tingkat pendapatan dan perspektif ekonomi islam.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

---

<sup>34</sup> M Askari Zakariah, Vivi Afriani, and K H M Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action , Reserch and Development (R n D)*. (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020). Hal.25

<sup>35</sup> Ibid hal.,30

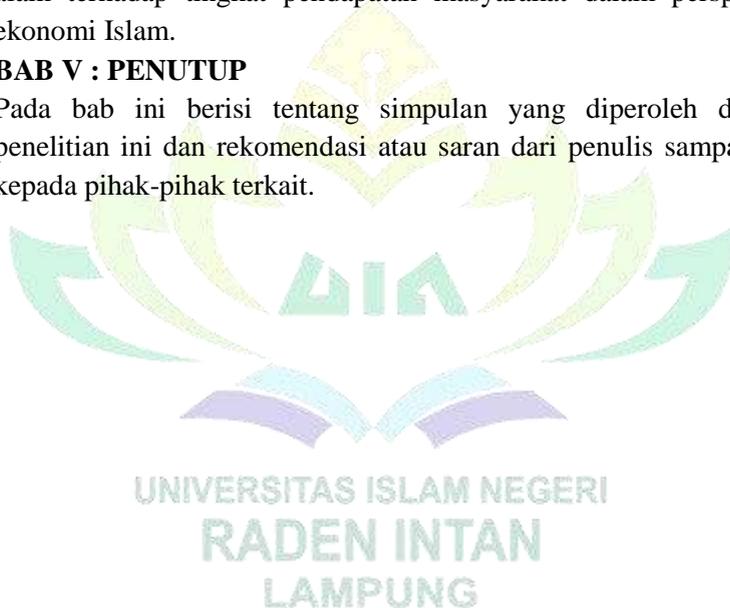
Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi gambaran umum kecamatan Sekincau terkhusus kawasan sekitar Unit Produksi Benih Sayuran, berisi penyajian fakta dan data penelitian yang penulis uraikan dengan data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dilapangan.

#### **BAB IV : ANALISIS PENELITIAN**

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang temuan penulis berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi guna menjawab rumusan masalah yaitu peran kelembagaan ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap tingkat pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini dan rekomendasi atau saran dari penulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan bermenjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”. Pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.<sup>36</sup>

Pemberdayaan juga berarti kegiatan yang menyaratkan adanya sebuah perubahan, yaitu perubahan kondisi seseorang, sekelompok orang, organisasi maupun komunitas menuju kondisi yang lebih baik. Disini kata pemberdayaan mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh dan kuat. Pemberdayaan ekonomi perlu didukung oleh semua pihak. Dikarenakan pemberdayaan ekonomi akan memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat yang mayoritas dalam umat islam. Dengan demikian, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga merupakan agenda umat yang pada prinsipnya manfaat dari pemberdayaan ekonomi tersebut akan kembali kepada umat.

---

<sup>36</sup> Arina Ayu Putri and A.A. Muttaqin, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ponorogo Cerdas (Studi Pada Mustahiq Baznas Ponorogo),” *Journal Islamic Economics and Finance in Focus* 1, no. 2 (2022): 123–34.

## 1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi keajaaran bawah yang intinya pemberdayaan upaya membngkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan dan pemberdayaan diadakan agar daerah semakin mampu serta mandirian, maksudnya mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat serta membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.<sup>37</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untk memandirikan masyarakat serta potensi kemampuan yang mereka memiliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang sering terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayaakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potenssi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, serta mengangkat harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosil, agama dan budaya.<sup>38</sup>

### a. Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Jim Ife

Dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* (1997), Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga

---

<sup>37</sup> Nihayatus Sholichah and Charity Oktoliya, "Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah Di Kampung Susu Lawu Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan," *jurnal Asketik* 5, no. 2 (2021): 175–204, <https://doi.org/10.30762/asketik.v5i2.826>.

<sup>38</sup> fitria martanti, "Evaluasi Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin," *Journal of Economic Education* 1, no. 2 (2012): 96–102.

untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya.

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep disadvantaged (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

- 1) Pertama, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.
- 2) Kedua, perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.
- 3) Ketiga, perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi

oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.

- 4) Keempat, perspektif Post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.<sup>39</sup>

Jim Ife juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah: kemampuan menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekurangan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi pemberdayaan yang bisa dilakukan. Ketiga strategi itu adalah:

- a) Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- b) Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka rangka membangun kekuasaan yang efektif.

---

<sup>39</sup> Jim Ife, *Community Development: Creating community alternatives - vision, analysis and practice.* / Ife, J.W. (Melbourne: Longman Australia, 1995) 297.

- c) Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

Dengan mempertimbangkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Oleh karena itu, setiap usaha pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah harus dipandang sebagai dorongan untuk mempercepat kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek sehingga mereka dapat membangun masyarakat yang mandiri, bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga kehidupan dapat berkembang.

Peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana/ fasilitas yang dapat diciptakan dari kegiatan social ekonomi harus menganut beberapa prinsip sebagai berikut :

- a) Mudah diterima dan didaya gunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (*acceptable*)
- b) Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan (*accountable*).
- c) Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*).
- d) Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (*sustainbele*).
- e) Pengelola dan dan pelestarian hasil dapat dengan mudah dan digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Kadek Rai Suwena . S.Pd., M.Pd., M Pd Dra Lulup Endah Tripalupi, and Ni Putu Yuni Kartika, "Analisis Pendapatan Kaum Perempuan Sebelum Dan Setelah Mengikuti Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (Spp) Di Desa Penebel," *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha* 4, no. 1 (2014).

Pemberdayaan ekonomi merupakan usaha dalam mengembangkan atau memberdayakan ekonomi masyarakat yang sebelumnya kurang mampu.<sup>41</sup> Pemberdayaan ini sebenarnya banyak sekali didukung oleh kebijakan pemerintah diantaranya:

- 1) Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang didalam GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah”, antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI“
- 2) Sedangkan didalam UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegaskan bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat “.
- 3) Mencermati rumusan kebijakan pemerintah didalam dua dokumen kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah“. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap

---

<sup>41</sup> Lisda Dzulhijjah, Deden Sumpena, and Ali Azis, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE),” *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i1.24162>.

upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.

- 4) Didalam UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik “.

## **b. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Tujuan pemberdayaan ekonomi Banyak faktor yang mempengaruhi kemakmuran masyarakat. Keadaan perumahan yang mereka diami, ada tidaknya aliran listrik, fasilitas untuk memperoleh air bersih, keadaan infrastruktur pada umumnya, dan tingkat pendapatan yang diperoleh merupakan beberapa faktor penting yang sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu masyarakat. Dari berbagai faktor diatas, salah satu faktor terpenting adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat. Sebagai akibat dari pendapatan yang rendah, maka akan memunculkan masalah berikut:

- 1) Masalah kekurangan gizi dan taraf kesehatan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kalori makanan yang belum mencapai tahap minimum, tingkat kematian pertahun dan tingkat kematian bayi yang tinggi.
- 2) Kemiskinan masih meluas. Bagian yang cukup dari penduduk daerah berkembang memperoleh pendapatan dibawah garis kemiskinan. Artinya pendapatan mereka tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan minimum sehari-hari.

- 3) Taraf pendidikan masih rendah. Sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah, cukup banyak keluarga di negara berkembang yang tidak dapat membiayai sekolah anak – anaknya.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengajarkan individu dan masyarakat untuk menjadi mandiri. Kemandirian ini mencakup kemandirian dalam hal berpikir, bertindak, dan mengontrol tindakan mereka. Kemandirian masyarakat adalah ketika sebuah masyarakat memiliki kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, dan melakukan apa yang dianggap sesuai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan kekuatan dan kemampuan mereka. Adapun tujuan pemberdayaan sebagai berikut :

**a) Perbaikan Kelembagaan“ *Better Instution*”**

Dengan melalui tindakan perbaikan kegiatan diharapkan dapat memperbaiki kelembagan pengembangan jejaring kemitraan usaha.

**b) Perbaikan Usaha“ *Better Business*”**

Dengan melakukan perbaikan pendidikan , kelembagaan,diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang telah dilaksanakan.

**c) Perbaikan Pendapatan“ *Better Income*”**

Dengan adanya perbaikan usaha, diharapkan dapat memperbaiki sistem pendapatan keluarga dalam mencukupi kebutuhan .

**d) Perbaikan Lingkungan“ *Better Environment*”**

Melalui perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan sekitar baik dari fisik maupun sosial. Kerusakan lingkungan terjadi akibat banyaknya angka kemiskinan .

---

<sup>42</sup> Aprillia Nilasari and Risky Amelia, “Pengaruh PDRB Per Kapita , Indeks Pembangunan Manusia , Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Perkembangan Rasio Gini Indonesia,” *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation* 2, no. 2 (2022): 171–82.

**e) Perbaiki Kehidupan“ *Better Living*”**

Dengan melalui pendapatan serta lingkungan, diharapkan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

**f) Perbaiki Masyarakat“ *Better Community*”**

Perbaiki kehidupan masyarakat serta lingkungan diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

**c. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut buku metodologi penelitian *Drijver dan Sajise*, ada lima prinsip utama pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Dalam hal ini, pengelola dan pemangku kepentingan menyepakati tujuan yang ingin dicapai dari metode berikut (metode tombol), kemudian secara bertahap mengusulkan gagasan dan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Partisipasi: Setiap peserta memiliki kekuasaan di setiap tahap perencanaan dan pengelolaan.
- 3) Konsep keberlanjutan: menjalin kemitraan dengan semua sektor masyarakat untuk membuat program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- 4) Integritas: kebijakan dan strategi di tingkat lokal, regional dan nasional. Program pemberdayaan masyarakat yang memberikan bantuan keuangan harus memasukkan unsur-unsur yang biasanya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Rencana tersebut harus mampu mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis.

---

<sup>43</sup> Alan Bayu Aji, Yuris Tri Naili, and Monica Puspa Dewi, “Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa,” *Jurnal Hukum In Concreto* 1, no. 1 (2022): 39–56.

*UNICEF* mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi.

**a) Kesejahteraan**

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.<sup>44</sup>

**b) Akses**

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

**c) Kesadaran kritis**

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran

---

<sup>44</sup> Emi Dewi Susanti, Nalom Siagian, and Hisar Siregar, "Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Perempuan Di Kabupaten Nias Selatan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 3, no. 1 (2023): 107–23, <https://doi.org/10.51622/jispol.v3i1.1345>.

masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

**d) Partisipasi**

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.

**e) Kontrol**

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.<sup>45</sup>

Penulis ngeutarakan bahwa Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan

**1. Prinsip Kesetaraan.**

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan,

---

<sup>45</sup> Indah Fitria et al., “Pemberdayaan Masyarakat Desa Negeri Lama Seberang Melalui Pelatihan Pembuatan Rengginang Sebagai Home Industry,” *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 4, no. 2 (2021): 99–109, <https://doi.org/10.30603/md.v4i2.2270>.

pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

## 2. Partisipasi.

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

## 3. Keswadayaan Atau Kemandirian.

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Sindi Astutik and Ertien Rining Nawangsari, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Sheltered Workshop Peduli 'Sambung Roso' Di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 4 (2023): 381–85, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i4.646>.

#### 4. Berkelanjutan.

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.<sup>47</sup>

#### d. Tahapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan efisien, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:

- 1) Identifikasi Masalah. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil masyarakat dan masalah-masalah yang dihadapi. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, survei kuesioner, atau metode lain yang sesuai. Hasil identifikasi masalah dapat digunakan untuk menentukan prioritas masalah yang akan diselesaikan dan sasaran pemberdayaan yang akan dilakukan.
- 2) Perencanaan Program. Tahap ini bertujuan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kegiatan, anggaran, jadwal, dan indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Perencanaan program harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan. Perencanaan program harus berdasarkan pada potensi dan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program.

---

<sup>47</sup> Erna Haryanti, "Analisis Laporan Kajian Tipikasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Di Kawasan Pedesaan Kabupaten Bekasi," *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 20, no. 2 (2020): 32–47, <https://doi.org/10.30742/jisa20220201219>.

- 3) Pelaksanaan Program. Tahap ini bertujuan untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pelaksanaan program harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, kemitraan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Pelaksanaan program harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, sumber daya materiil yang memadai dan tepat guna, serta sumber daya informasi yang akurat dan terpercaya.<sup>48</sup>
- 4) Pemantauan dan Evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk mengukur dan menilai proses dan hasil program pemberdayaan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, analisis data, penyusunan laporan, serta penyampaian umpan balik. Pemantauan dan evaluasi harus melibatkan partisipasi dari semua pihak yang terkait dalam program pemberdayaan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara berkala dan sistematis untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran program serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi.
- 5) Pengembangan Kapasitas. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai subjek pemberdayaan. Pengembangan kapasitas dapat dilakukan dengan cara penyuluhan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, fasilitasi, advokasi, atau metode lain yang sesuai. Pengembangan kapasitas harus berorientasi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, komitmen, kepercayaan diri, kemandirian, serta jaringan kerjasama masyarakat.

---

<sup>48</sup> Yuliana Dewi Rahmawati1, Hartuti Purnaweni, and Tukiman Taruna, "Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Di Desa Cangkringkecamatan Karanganyar Kabupaten Demak," *Jurnal EKOSAINS* 7, no. 4 (2016): 83–93, <https://jurnal.uns.ac.id/ekosains/article/view/61954/35855>.

- 6) Pengelolaan Keberlanjutan. Tahap ini bertujuan untuk menjaga agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa tergantung pada bantuan dari pihak lain. Pengelolaan keberlanjutan dapat dilakukan dengan cara pembentukan lembaga masyarakat mandiri (LMM), pengembangan sistem informasi manajemen (SIM), pengembangan mekanisme pembiayaan mandiri (MPM), pengembangan model kerjasama strategis (MKS), atau metode lain yang sesuai. Pengelolaan keberlanjutan harus berdasarkan pada prinsip swadaya, gotong royong, demokrasi, dan kesejahteraan bersama.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Islam

pemberdayaan masyarakat Islam adalah upaya sistematis dan terencana untuk membawa perubahan sosial menjadi tatanan sosial yang lebih baik berdasarkan ajaran Islam. Pemberdayaan masyarakat Islam adalah bagian dari dakwah. Namun, kegiatan dakwah mengalami pergeseran paradigma.<sup>49</sup>

Pemberdayaan merupakan sesuatu yang patut untuk dilakukan, karena bagian dari wilayah ketuhanan dan kemanusiaan. Pada wilayah ketuhanan, pemberdayaan terlihat jelas dari perintah untuk membangun kepedulian kepada sesama, terutama kepada masyarakat yang belum berdaya. Kewajiban menunaikan shalat yang kalimatnya selalu beriringan dengan perintah zakat adalah indikasi jika Tuhan memerintahkan setiap manusia untuk membangun kepedulian. Semakin sikap ini sering dipraktekkan dalam kehidupan, semakin terlihat wujud pemberdayaan dalam masyarakat. Pada wilayah kemanusiaan, setiap manusia yang memiliki daya memiliki kewajiban secara sosial untuk memberdayakan manusia-manusia lainnya yang berada dalam kondisi ketidakmampuan, terutama dalam bidang ekonomi. Sehingga, kehidupan manusia-manusia yang belum

---

<sup>49</sup> Ichwansyah Tampubolon, "Muhammadiyah Dan Pemberdayaan Masyarakat Islam," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 1, no. 1 (2019): 54–68, <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i1.1047>.

berdaya dapat berubah menjadi lebih baik, lebih mandiri dan akhirnya dapat berkontribusi dalam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat setempat.

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kekuatan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran. Dalam potensinya dan mengembangkannya. Pengembangan ekonomi umat untuk kepentingan masyarakat atau untuk meningkatkan kemampuan rakyat secara keseluruhan dengan mengembangkan dan mendinamiskan potensi mereka melalui usaha yang dilakukannya disebut pemberdayaan ekonomi umat.<sup>50</sup>

Al-Qur'an merupakan kitab suci agama islam .karena alquran menjadi pedoman bagi umat islam.pemberdayaan adalah salah satu visi-misi al-quran untuk menjelaskan kepada manusia bahwa alquran terus berlaku sampai kapanpun dan dimanapun. Agenda pemberdayaan masyarakat juga sesuai dengan dimaksud oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-quran surat Ar-Ra'd · Ayat 11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

” *Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat*

---

<sup>50</sup> Khavid Normasyhuri, Budimansyah, and Ekid Rohad, “Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19,” *Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 16, file:///C:/Users/Fattia/Downloads/5793-18134-1-PB.pdf.

*menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S Ar-Ra'd [13]:11)*

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan dan martabat suatu masyarakat, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Manusia diminta untuk berusaha meningkatkan kompetensi dan bekerja keras demi mengubah nasib mereka sendiri. Ayat ini juga mendorong kemandirian dalam jiwa masyarakat. Tujuan pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat dan komunitas penerima program pemberdayaan mampu mengubah nasib mereka dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Derajat keberdayaan yang pertama adalah kesadaran dan keinginan untuk berubah. Tanpa keinginan untuk memperbaiki diri, masyarakat akan sulit untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.

51

#### **a. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam**

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 (tiga) prinsip utama; yaitu ukhuwah, ta'awun, dan keadilan atau persamaan derajat.

##### **1. Prinsip Ukhuwah**

dalam bahasa arab berarti persaudaraan, di mana prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat. Prinsip ini berdasarkan pada

---

<sup>51</sup> Sany, U. (2019). “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur’an.” *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32-44.

firman Allah SWT yang termaktub dalam Qs. Al-Hujurat [49]:10. Prinsip ta'awun atau saling tolong-menolong, yang dilakukan oleh orang yang memiliki kecukupan kepada orang yang membutuhkan bantuan dan bimbingan sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Hujurat [49]:10.<sup>52</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”.(Q.s . Al-Hujurat [49]:10)

## 2. Prinsip Ta'awun

memiliki dimensi sinergitas, di mana berbagai pihak yang berkepentingan dapat terlibat demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal, sehingga, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ta'awun merupakan proses kolaboratif, di mana pemberdayaan bukan merupakan beban atau kewajiban satu pihak saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Dengan ta'awun, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, untuk merancang kebijakan, program dan upaya pemberdayaan yang memberikan dampak yang signifikan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Muhammad Khalid and Fajar Utama Ritonga, “Penerapan Prinsip Ukhuwah Islamiyah: Serikat Tolong Menolong Al-Amin Dusun X Desa Bandar Setia,” *Jurnal Penelitian Inovatif* 2, no. 3 (2022): 433–40, <https://doi.org/10.54082/jupin.97>.

<sup>53</sup> Magnum Opus, and Nabilah Amalia Balad, “Abdurrahman, 1980. Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria Seri Hukum Agraria V , Bandung, Alumni, Hlm. 1. 1 18” *Jurnal Hukum* 2 (2019): 18–28.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقُلُوبَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا يَوْمَ  
أَخْلَقْتُم فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.(Qs Al-Mā'idah [5]:2)

### 3. Prinsip Persamaan Derajat Antar Umat Manusia.

Kata musawah berasal dari kata dasar sawwa berarti meratakan, menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah

musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama.<sup>54</sup>

Prinsip ini telah diproklamirkan sejak 14 abad yang lalu melalui firman Allah yang terdapat dalam Qs. Al-Hujurat [49]:13.<sup>55</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti". ( Qs. Al-Hujurat [49]:13).*

Persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Maksudnya Ada beberapa hal berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam, yaitu:

- 1) Persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam adalah dalam hak dan kewajiban, Islam menjadikan keduanya sama, yaitu dalam kewajiban-kewajiban agama, hak pribadi, martabat manusia, hak-hak sipil dan kekayaan.
- 2) Persamaan sosial di masyarakat. Maksudnya adalah dalam kehidupan masyarakat, setiap orang

---

<sup>54</sup> Ulfy Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (2019): 32, <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>.

baik kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat berada pada hak dan kewajiban yang sama meskipun implementasinya berbeda karena faktor otoritas di dalamnya seperti pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang sedangkan rakyat tidak berhak untuk membuat undang-undang.

- 3) Persamaan manusia di depan hukum. Maksudnya adalah dalam hukum, siapa pun akan menerima hukuman sesuai dengan perilakunya. Tidak ada kata hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.<sup>56</sup>
- 4) Persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Maksudnya adalah setiap orang memiliki hak untuk menjadi pejabat publik. Contohnya ketika Rasulullah memberikan jabatan panglima, gubernur dan jabatan-jabatan strategis lainnya pada banyak budak yang telah dimerdekan seperti Zaid, Usamah bin Zaid, dan lainnya.
- 5) Persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Maksudnya adalah setiap manusia dalam kedudukan sama di sisi Allah.

### **c. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Islam.**

Berikut merupakan tahapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

1. Tahap Penayadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli terhadap kapasitas diri dan berupaya untuk memperbaiki atau meningkatkannya.

---

<sup>56</sup> M Fatkhullah and M A F Habib, "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Peluang, Dan Tantangan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 6 (2023): 137–53, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/20465>.

2. Tahap transformasi kemampuan yang berupa pengetahuan, kemampuan keterampilan dasar agar masyarakat dapat mengambil peran dalam kegiatan pemberdayaan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan untuk membentuk inisiatif dan kemampuan berinovasi agar dapat membentuk kemandirian diri.<sup>57</sup>

## **B. Pengelolaan Pertanian**

### **1. Definisi Pertanian**

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak, meskipun cukupnya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional.<sup>58</sup>

Sektor pertanian memainkan peran strategis dan penting dalam pembangunan negara. Mereka harus meningkatkan penerimaan asing negara, menambah lapangan kerja, meningkatkan nilai dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini terbukti dengan kontribusi besar sektor pertanian terhadap PDB, terutama selama krisis ekonomi Indonesia. Selain itu, selama periode antara tahun 1997 dan 1998,

---

<sup>57</sup> Linda Handayani and Aliyudin Aliyudin, "Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Keluarga Harapan (PKH)," *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2023): 21–42, <https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i1.24164>.

<sup>58</sup> Ufira Isbah and Rita Yani Iyan, "Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Riau," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* Tahun VII, no. 19 (2016): 45–54.

sektor pertanian adalah satu-satunya sektor yang berhasil menyelamatkan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan positif.

Usaha pertanian jangka panjang berkonsentrasi pada produk pertanian olahan yang meningkatkan nilai ekonomi, seperti: pengembangan industri pertanian. Salah satu sektor agribisnis yang berfokus pada ekspor dan meningkatkan nilai tambah adalah perkebunan. Nilai PDB pertanian tumbuh dan Nilai PDB pertanian terus meningkat setiap tahunnya. Peran sektor pertanian dapat diperkuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan Indonesia jika dilihat dengan baik. Agribisnis dan pertanian memiliki manfaat dan peran yang jelas secara empiris. Pertama dan terpenting, agribisnis adalah industri nonmigas dan bentuk kontribusi atau bagian relatif dari nilai tambah nonmigas dalam industri dan ekspor gas yang mahal.

kemampuan pada sektor pertanian untuk meningkatkan produksi dan membantu dalam mengentaskan kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu;

- a. kemampuan untuk mengatasi kendala dalam pengembangan produksi
- b. kapasitas untuk melaksanakan reorientasi dan implementasi arah serta tujuan pengembangan agribisnis padi; dan
- c. kesuksesan dalam menjalankan berbagai program diversifikasi usaha tani di lahan sawah dengan mempertimbangkan komoditas alternatif non padi seperti palawija dan asparagus.<sup>59</sup>

Agar tercipta pembangunan pertanian yang berdaya saing maka perlu diperhatikan hal-hal berikut: Pertanian modern harus dapat diciptakan, yaitu mencakup:

1. Teknologi usaha tani dan daya guna atau efisiensi harus diperbaiki secara berkesinambungan;
2. Ragam komoditi yang dihasilkan usaha tani harus selalu disesuaikan dengan permintaan pasar dan biayaproduksi;

---

<sup>59</sup> Baim Wongkar, Fanley Pangemanan, and Neni Kumayas, "Strategi Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Produktifitas Tanaman Hortikultura Di Kecamatan Modinding," *Jurnal Governance* 3, no. 1 (2023): 1–13.

3. Kualitas atau mutu lahan pertanian, ketrampilan tenaga kerja dan peralatan kerja usaha tani harus berubah sesuai dengan kebutuhan; 4. Kombinasi proporsi antara lahan, tenaga kerja dan modal selalu berubah sebagai akibat perubahan tingkat pertumbuhan penduduk, alternative kesempatan kerja dan teknologi usaha tani; dan
4. Pelayanan dari pemerintah dan swasta karena perubahan fungsional dalam cara-cara baru.<sup>60</sup>

Didalam pengelolaan pertanian terdapat juga indikator pemberdayaan masyarakat yang diperlukan dalam pertanian:

- a) Kesadaran: Melibatkan tokoh masyarakat sebagai instruktur, penggerak, motivator, dan panutan. Kesadaran tentang pentingnya pertanian dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.
- b) Kapasitas: Dilakukan melalui kegiatan pelatihan. Masyarakat diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk mengelola pertanian secara efektif.
- c) Pemberdayaan: Melibatkan pendampingan masyarakat. Dalam tahap ini, masyarakat didorong untuk mengambil inisiatif, mengelola sumber daya, dan mengambil keputusan yang berdampak pada pertanian.<sup>61</sup>

## 2. Pertanian Menurut Islam

Pertanian dalam bahasa Arab disebut dengan menanam atau menyemai. Setelah bumi ini diciptakan dan Nabi Adam AS. Diturunkan untuk menghuninya, Allah SWT

---

<sup>60</sup> and Fanley N. Pangemanan Kogoya Tundiles Ventje Kasenda, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua," *Journal Governance* 3, no. 1 (2023): 1–15.

<sup>61</sup> Priyo Subekti, Yanti Setianti, and Hanny Hafiar, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Kawistara* 8, no. 2 (2018): 148, <https://doi.org/10.22146/kawistara.30379>.

memerintahkan agar baginda memakmurkan bumi. Pertanian dan penternakan merupakan pekerjaan Adam AS dan keluarganya untuk meneruskan kehidupan. Keturunan Adam seterusnya meneroka tanah demi tanah bagi tujuan ini. Sehingga sekarang terdapat tanah yang sudah dibajak dan masih ada yang belum dikerjakan. Ruang lingkup pertanian meliputi bercucuk tanam, penternakan dan mengusahakan kebun. Ini juga merangkumi pengeluaran bahan makanan, makanan ternakan, fiber dan bahan lain melalui suatu sistem ternakan atau tanaman. Ini termasuk tatacara untuk memternak dan memproses ternakan.<sup>62</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Waqiah, ayat 63 dan 64. sebagai berikut :

أَفَرَأَيْتُمْ مَ تَحْرُثُونَ ۗ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

*“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?”.*(Q.s Al-Waqiah,[56]:63-64).

Pertanian telah menjadi pekerjaan manusia sejak dahulu kala. Manusia tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan ini. Namun demikian, gelombang modernitas sampai batas tertentu telah meminggirkan praktik mulia ini. Pembangunan demi kepentingan pembangunan telah mengurangi lahan untuk melakukan kegiatan pertanian. Sektor konstruksi dan manufaktur yang berkembang pesat telah mengalihkan perhatian generasi baru. Mereka lebih menyukai lingkungan kerja yang tidak becek, tidak semanggi.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Susan Gunasti and By Adam Sabra, “Journal of Islamic Studies Contents” 24, no. 3 (2013): 21–22.

<sup>63</sup> Syed Najihuddin Syed Hassan et al., “Pertanian Menurut Perspektif As-Sunnah: Tinjauan Umum Pemikiran Dan Sumbangan Tokoh-Tokoh Ilmuwan Islam,” *Journal Of Hadith Studies* 6, no. 2 (2021): 92–106, <https://doi.org/10.33102/johs.v6i2.151>.

Menurut Islam, kita hanya diizinkan untuk terlibat dalam perdagangan secara sukarela, dan kita dilarang untuk mengambil hak atau harta orang lain secara tidak sah. Ini mencakup petani, terutama petani yang tinggal di daerah pedesaan dan biasanya mengelola lahan atau menggarap tanah orang lain selain mencari pekerjaan untuk membantu keluarga. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk membantu dan memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah kerjasama. Dalam situasi di mana seseorang memiliki satu hal tetapi orang lain tidak, orang-orang harus berkolaborasi, bertukar kebutuhan dan pengetahuan, atau keterampilan. Kerjasama melalui bagi hasil adalah salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pertanian. Dalam agama Islam, orang dapat bekerja sama untuk menyewa atau menghasilkan barang bergerak dan tidak bergerak, seperti tanah.<sup>64</sup>

## **C. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi**

### **1. Definisi Kelembagaan Ekonomi**

Kelembagaan dapat didefinisikan sebagai kumpulan kebiasaan dan tindakan yang terkait dengan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial atau interaksi antar masyarakat, dan membentuk piranti sosial untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia ketika berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Proses perubahan sosial yang direncanakan, pengembangan kelembagaan bertujuan untuk penggerak perubahan dan inovasi. Proses transformasi kelembagaan pada petani melalui pembangunan atau pengembangan kelembagaan dapat menjadikannya bagian penting dalam kehidupan petani dengan memenuhi kebutuhan usahatani mereka. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani adalah perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan. Ini melibatkan inovasi yang menghasilkan perubahan kualitatif dalam norma, pola

---

<sup>64</sup> Dianna Daru Nur, *Pengembangan Pertanian Modern Dari Perspektif Islam* ed.at (Sebuah Pengantar Daru Nur Dianna,no. March 2020) 0–28.

kelakuan, hubungan kelompok, dan pemahaman baru tentang tujuan dan metode.<sup>65</sup>

Sejarawan ekonomi terkemuka mendefinisikan kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial dan ekonomi. **Schmid North** mengartikan kelembagaan sebagai sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Kelembagaan merupakan regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situasi tertentu yang berulang. Menurut Jack Knight mengartikan kelembagaan adalah serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dalam sebuah komunitas.

**Ostrom** mengartikan kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya. Singkatnya, kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi sesama anggota masyarakat. Interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi, politik maupun sosial.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Sapja Anantanyu, *Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya* 1 ed.al (7, no. 2 ,2011) 102–9.

<sup>66</sup> Maryadi Syarif, “Teori Dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam [Theory and Model of Institutional Development of Islamic Higher Education],” *Media Akademika* 28, no. 3 (2013): 341, <http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/mediaakademika/article/view/459>.

### a. Komponen Kelembagaan

Sebuah bentuk relasi sosial kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai satu bentuk kelembagaan apabila memiliki empat komponen, sebagai berikut;

- 1) Komponen person, di mana orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
- 2) Komponen kepentingan, di mana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh suatu kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus sering berinteraksi.
- 3) Komponen aturan, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
- 4) Komponen struktur, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.<sup>67</sup>

### b. Ciri- Ciri Kelembagaan

- 1) Kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen. Menjadi permanen, karena dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan.
- 2) Berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku yang terdiri dari nilai, norma, hukum, peraturan- peraturan, pengetahuan, ide-ide, *belief* dan moral. Sesuatu yang abstrak tersebut merupakan suatu yang kompleks dari beberapa hal yang sesungguhnya terdiri dari beberapa bentuk yang tidak sepadan (selevel). Hal yang abstrak ini kira-kira sama dengan *public mind*, atau “wujud ideal kebudayaan”.

---

<sup>67</sup> Yudi Rustandi Sumaryanto, *Buku Ajar Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Petani*, 2017, [www.bali.litbang.deptan.go.id](http://www.bali.litbang.deptan.go.id).

- 3) Berkaitan dengan perilaku atau seperangkat mores (tata kelakuan), atau cara bertindak yang mantab yang berjalan di masyarakat (*establish way of behaving*). Perilaku yang terpola yang merupakan kunci keteraturan hidup.
- 4) Kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi. Kelembagaan merupakan cara standar untuk memecahkan masalah. Tekanannya adalah pada kemampuannya untuk memecahkan masalah.

## 2. Kelembagaan Ekonomi Pertanian

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling penting, menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2012, dan pemenuhannya merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan komponen utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain menyelamatkan kehidupan rumah tangga, pengelolaan ketahanan pangan dapat berdampak pada ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan nasional. Kelembagaan pertanian memainkan peran penting dalam pengelolaan pangan karena, secara empiris, pengelolaan pangan tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian, tetapi juga oleh instansi lain.<sup>68</sup> Karena itu, diperlukan pengorganisasian yang optimal untuk memastikan bahwa semua instansi bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Fokus konsep ketahanan pangan terdapat pada pemenuhan kebutuhan konsumen pangan. Prioritas Nasional Ketahanan Pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan sepanjang musim sehingga semua orang dengan leluasa dapat mengaksesnya, dengan jumlah, mutu, dan jenis nutrisi

---

<sup>68</sup> Yennita Sihombing, "Inovasi Kelembagaan Pertanian Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan," *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences* 5 (2023): 83–90, <https://doi.org/10.30595/pspfs.v5i.707>.

yang mencukupi serta dapat diterima secara budaya. Hal ini membuka peluang terbukanya perdagangan luar negeri, baik bilateral maupun multilateral, sehingga krisis pangan akibat kurang atau berlebihnya demand/supply komoditas pertanian antar negara dapat diatasi dengan ekspor dan impor yang memanfaatkan sumber daya antar negara secara lebih efisien (Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, 2020).

Peran pengumpul masih lebih penting, terutama dalam sistem pemasaran, karena para petani biasanya tidak dalam posisi tawar. Selain tingkat serangan hama dan penyakit yang tinggi, petani tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan pertanian. Situasi ini dibuat lebih sulit karena peran kelembagaan petani yang masih kurang. Kadang-kadang, untuk kepentingan golongan tertentu, para petani membentuk kelompok tani sebagai tempat belajar, bekerja sama, dan produksi. Akibatnya, petani hanya bertindak sebagai penerima harga, yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Menurut orientasi pembangunan Indonesia saat ini, kelembagaan pertanian, termasuk kelembagaan petani, memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di masa depan. Selain itu, kelembagaan ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengembangkan usaha tani mereka sendiri. untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing pertanian.<sup>69</sup>

Pembangunan pertanian pada dasarnya mencakup pengembangan dan peningkatan komponen seperti teknologi, sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat kecukupan untuk mencapai kinerja pembangunan yang diinginkan. Dengan kata lain, jika satu atau lebih dari faktor tersebut tidak tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, tujuan untuk mencapai kinerja tertentu. Salah satu masalah dalam pengelolaan

---

<sup>69</sup> Anita Ida Lestari and Andri Amaliel Managanta, "Faktor-Faktor Yang Berperan Penting Pada Peningkatan Pendapatan Petani Jagung Kuning Di Kabupaten Poso," *jurnal pertanian* 2022, 129–40.

sumberdaya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah satunya kelembagaan petani. Penguatan kelompok tani telah dilaksanakan sebagai upaya regenerasi petani melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh karena itu, pembangunan kelembagaan petani harus didasarkan pada gagasan bahwa:

- 1) Proses pertanian membutuhkan sumber daya manusia yang kuat yang didukung oleh infrastruktur, peralatan, kredit, dan lainnya;
- 2) Pembangunan kelembagaan petani lebih sulit daripada manajemen sumberdaya alam.karena membutuhkan faktor pendukung dan unit produksi;
- 3) Kegiatan pertanian mencakup Tiga garis: input dibuat, input diubah menjadi produk dengan tenaga kerja dan manajemen, dan output dihargai.
- 4) Kegiatan pertanian membutuhkan dukungan kebijakan dan kelembagaan dari pusat hingga lokal, dan
- 5) Kompleksitas pertanian, yang mencakup unit usaha dan kelembagaan, sulit dicapai.<sup>70</sup>

Keberhasilan pengembangan suatu komoditas tidak hanya dipengaruhi oleh budidaya yang dilakukan oleh petani tetapi juga di luar budidaya baik pengadaan sarana produksi, penanganan pasca panen, pemasaran maupun jasa penunjang untuk kelancaran kegiatan tersebut, yang membentuk suatu sistem dan disebut dengan agribisnis.

Fakta bahwa petani terlibat dalam lembaga ini menunjukkan betapa pentingnya kelompok petani bagi mereka aktivitas kelompok tani dan keuntungan yang mereka peroleh dari keterlibatannya. Lembaga petani berfungsi sebagai pusat untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang lebih luas, sehingga diperlukan oleh pemangku kepentingan yang lain,

---

<sup>70</sup> Pusat Penelitian et al., “70349-ID-Alternatif-Konsep-Kelembagaan-Untuk-Pena,” *Syahyuti*, no. 70 (1985): 113–27.

terutama pemerintah. Secara umum, lembaga petani ini belum mampu memenuhi harapan pemerintah dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Berdasarkan empat dimensi, keberhasilan kelembagaan petani didefinisikan sebagai keberhasilan petani dalam mengelola organisasi petani mereka. Mereka terdiri dari pencapaian tujuan, fungsi dan peran, inovasi, dan keberlanjutan.<sup>71</sup>

### 3. Kelembagaan Ekonomi Menurut Islam

#### a. Lembaga

Lembaga merupakan seperangkat norma yang mengatur interaksi yang saling terikat atau saling bergantung dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi.<sup>72</sup> Lembaga juga mencakup norma-norma sosial yang mengatur tingkah laku dan interaksi antar anggota masyarakat sesuai dengan aturannya. Lembaga dalam konteks Islam memiliki peran yang penting dalam mengatur dan melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagai contoh lembaga-lembaga Islam seperti perbankan syariah yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sesuai prinsip Islam. Lembaga keuangan Islam mempunyai dampak yang positif pada pembangunan ekonomi Islam dengan meneliti bagaimana lembaga-lembaga keuangan Islam dapat mendorong investasi yang lebih berkelanjutan dan memberikan akses keuangan kepada lapisan masyarakat yang lebih luas. Didalam Al-Quran surah Ali imran ayat 110 . yang berbunyi:

---

<sup>71</sup> Sapja Anantanyu, Margono Slamet, and dan Prabowo Tjitropranoto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kelembagaan Petani (Kasus Di Provinsi Jawa Tengah) Efectivity of Famer's Institution and Their Determinant's Factors (Case: Province of Central Java)," *Jurnal Penyuluhan*, Maret 5, no. 1 (2009).

<sup>72</sup> Purba, C., Napitu, U., Matondang, M. K., Saragih, R., Purba, E., Nasution, A. M. L., & Saragih, D. T. A. (2022). Sosialisasi Peranan Maujana Nagori Dalam Membina Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Yang Multietnik Di Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(1), 19-42.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ  
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*”kamu umat yang dilahirkan, manusia menyuruh kepada yang terbaik yang dilahirkan manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah . Sekiranya ahli kitab beriman ,tentulah itu lebih baik bagi mereka ,diantara mereka yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pasik.” (Q.s Ali Imran [3]:110)*

Dalam surah diatas terdapat dua pertiga berisi tentang keharusan menegakkan keadilan atau pemberdayaan ekonomi dan membenci kezaliman. Dalam Al-Quran dengan Tegas mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk membantu kalangan orang miskin, karena sesungguhnya rezeki yang kita dapatkan itu dating dari Allah SWT. Agar kita bisa berbagi terutama kepada orang-orang miskin.<sup>73</sup>

## **b. Konsep dan Kelembagaan Islam**

Sistem perekonomian sangat erat kaitannya dengan suatu kelembagaan. Proses mengembangkan suatu lembaga-lembaga yang memiliki standar norma dan cita-cita tertentu sebagai landasan suatu kegiatan disebut sebagai pembentukan kelembagaan. Menurut pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kelembagaan adalah suatu organisasi atau badan yang bertujuan untuk melakukan suatu usaha dan penyelidikan dalam segi keilmuan. Ekonomi kelembagaan Islam adalah seperangkat peraturan yang mengatur aktivitas ekonomi dan

---

<sup>73</sup> Nasrun Ritonga and Rini Viri Insy Sinaga, “Semnastekmu 2021,” *Jurnal Ekonomi*, no. 2013 (2021): 181–88.

bisnis yang menganut pada prinsip-prinsip syariah. Ekonomi kelembagaan Islam ini berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dan sebagai sumber peraturan resmi, seperti undang-undang, dan aturan informal dalam sebuah perekonomian. Pengertian kelembagaan Islam ini meliputi struktur dan kepengurusan organisasi-organisasi yang menganut syariat Islam.

lembaga ekonomi Islam harus mencapai sejumlah tujuan, seperti mendorong kebebasan dalam melakukan ekonomi, mencapai keseimbangan antara hak pribadi dan publik, berorientasi pada keuntungan dan menjunjung tinggi etika bisnis serta perilaku ekonomi.<sup>74</sup>

### **c. Pembangunan Ekonomi Islam**

Pembangunan ekonomi Islam merupakan sebuah gagasan pertumbuhan ekonomi yang mengikuti hukum-hukum syariah yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Segala upaya pembangunan ekonomi harus memperhatikan hukum-hukum Islam dikarenakan mengacu pada konsep ekonomi Islam. Sistem ekonomi yang dikembangkan dalam ajaran Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan karena landasan pembangunan ekonomi Islam bersumber pada syariah yang merupakan sumber dan pedoman yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis sehari-hari. Islam memberikan pedoman operasional untuk mencapai tujuan syariah yang dikenal dengan istilah maqashid asy-syari'ah. Selain berkaitan dengan kepentingan kemanusiaan, tujuan-tujuan itu sendiri mempunyai arti penting bagi keadilan sosial ekonomi dan

---

<sup>74</sup> Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018): 13–32, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3755>.

persaudaraan serta kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih tinggi.

#### **D. Teori Ekonomi Islam**

##### **1. Definisi Ekonomi Islam**

Ekonomi islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.<sup>75</sup> Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

##### **a. Muhammad Abdul Manan**

*Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of islam.* jadi, menurut abdul manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah

---

<sup>75</sup> Nikmatul Husna and Husni Thamrin, "Konsep Mikro Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 43–51, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8516](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8516).

ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.<sup>76</sup>

### **b. M. Umer Chapra**

*Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.* Jadi, menurut chapra ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>77</sup>

### **c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi,**

Ilmu ekonomi islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami. Nilai-nilai Islam menjadi dasar dari semua aktivitas ekonomi Islam, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Menurut beberapa ahli, ekonomi Islam adalah bidang yang menyelidiki perilaku manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan alat yang diatur oleh syariah. Namun demikian, definisi tersebut memiliki kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak dapat diandalkan dan tidak universal. Karena, berdasarkan definisi tersebut, mendorong seseorang

---

<sup>76</sup> Subaidi, Muhaimin and Muchlasin Muchlasin. "Abdul Manan economics Perspektif Muhammad Abdul Mannan Tentang Kegiatan Ekonomi Islam." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2022): n. pag.

<sup>77</sup> Ekonomi Islam et al., "*El Mudhorib*" 2 (2022).

untuk terperangkap dalam keputusan apriori, juga dikenal sebagai keputusan apriori, apakah itu benar atau salah, harus diterima. Berdasarkan syariat Islam, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta Ijma para ulama, ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi.<sup>78</sup>

Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua aturan yang diberikan oleh Allah SWT dalam sistem ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama dengan tujuan teori ekonomi Islam itu sendiri. Pada mencapai kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, dan menghapus kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian dari segala sesuatu yang dia buat. Demikian pula, dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>79</sup>

## 2. Nilai dan Prinsip Ekonomi Islam

Adapun nilai-nilai dasar ekonomi Islam menurut Mohammad Abdul Mannan ialah sebagai berikut:

### a. Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengatur manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah Swt. Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas keTuhanan yang menempatkan perangkat Islam sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip Islam. Kesadaran ketauhidan juga

---

<sup>78</sup> M Nur Rianto Al Arif and Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Prenada Media, 2016).

<sup>79</sup> Didi Suardi, H Muklis Bin Abdul Azis, and M A Ek, *Pengantar Ekonomi Islam*, 1 ed., (2021) hal 0-268,.

akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia.

#### **b. Adl (Keadilan)**

Keadilan adalah kata terbanyak disebut di dalam Al-Qur'an setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Karena itu dalam islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Dengan ini berarti nilai kata itu sangat penting dalam ajaran islam terutama dalam kehidupan hukum, sosial politik dan ekonomi. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa keadilan itu harus diterapkan di semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi, misalnya, keadilan harus menjadi penilai yang tepat, faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga, agar hasilnya sesuai dengan tekanan yang wajar dan kadar yang sebenarnya.<sup>80</sup>

#### **c. Khalifah (Kepemimpinan)**

Allah telah menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah Swt. Khilafah, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab kepada Allah tentang pengelolaan sumberdaya yang diamanahkan kepadanya.<sup>81</sup>

#### **d. Nubuwah (Kenabian)**

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabidan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang

---

<sup>80</sup> Mukhlisin Mukhlisin and Sarip Sarip, "Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif 'Al-'Adl' Dalam Al-Qur'an," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 55, <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1954>.

<sup>81</sup> Arifin Zain, "Khilafah Dalam Islam," *Manajemen Dan Administrasi Islam* 3, no. 1 (2019): 41.

bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).<sup>82</sup>

#### e. Ma'ad (Hasil)

Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosial ekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwah). Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosio-politik, karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan banyak rinciannya ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan arena dilestarikannya metode-metode yang digunakan oleh umat Muslim untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan.<sup>83</sup>

### 3. Karakteristik Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al-Quran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasarnya yang tepat. Al-Quran dan As-Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin

---

<sup>82</sup> Muhammad Syafirin, "Konsep Kenabian Dan Wahyu Dalam Al-Qur'an: Kajian Teologis QS. Al-Nisā'," *Jurnal Moderasi* 1, no. 2 (2021): 130–50, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index>.

<sup>83</sup> According M Mannan et al., *Sifat Motivasional Yang Mempengaruhi* 1 ed. (3, no. 1 ,2017) 216–38.

berprilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit sistem ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- a. Kesatuan (*unity*)
- b. Keseimbangan (*equilibrium*)
- c. Kebebasan (*free will*)
- d. Tanggung jawab (*responsibility*).<sup>84</sup>

Al-Quran mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama. Setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan kepada sumber-sumber hukum ekonomi Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berijtihad atas suatu fenomena ekonomi. Selain kegiatan bermuamalahnya diatur, harus sesuai dengan hukum ekonomi Islam, dalam memanfaatkan potensi alam untuk ekonomi harus sesuai aturan hukum ekonomi Islam.

#### 4. Dasar Hukum Ekonomi Islam

##### a. Al-Quran

Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang ada dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 80 :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

---

<sup>84</sup> Suhendi, "Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan," *Iqtishaduna* 1, no. 2 (2012): 299–309, <https://www.neliti.com/id/publications/314708/>.

*“Barangsiapa yang taat kepada rasul dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, berarti ia telah taat kepada Allah. Dan barangsiapa yang menolak taat kepadamu -wahai Rasul- janganlah kamu sedih karenanya. Karena Kami mengutusmu semata-mata untuk mengawasinya dan menjaga amal perbuatannya. Dan Kami-lah yang akan menghitung serta menghisab amal perbuatannya”.*<sup>85</sup> (Q.s An-Nisa [4]:80)

### **b. As-Sunnah**

As-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, dasar pokok as-Sunnah sebagai sumber hukum, sebagaimana firman Allah surat An-Nisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Q.s An-Nisa[4]: 59)

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia, menyebutkan bahwa Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, laksanakanlah perintah-perintah Allah dan

---

<sup>85</sup>Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram). Referensi : <https://tafsirweb.com/1612-surat-an-nisa-ayat-80.html>

janganlah kalian mendurhakai-Nya, dan penuhilah panggilan rasul-Nya dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada kitab Allah dan Sunnah rasul-Nya, Muhammad, jika kalian memang beriman dengan sebenarnya kepada Allah dan hari perhitungan.<sup>86</sup>



---

<sup>86</sup> Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia Referensi : <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html> Hakim, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam."

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan pertanian melalui pengembangan kelembagaan, sudah sejalan peran kelembagaan dalam keberhasilan penerapan indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan penerapan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan yang didalamnya terdapat beberapa cara dan upaya pemberdayaan, kesetaraan dalam pemberdayaan baik umur, pendidikan dan jenis kelamin, keswadayaan/ kemandirian masyarakat sudah bisa memanfaatkan lahan dan beberapa teknik dalam pengelolaan pertanian, dan berkelanjutan yang mana mereka sudah bisa tidak di dampingi oleh lembaga dan sudah bisa mengambil keputusan tidakan sendiri. Namun masih ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah seperti contoh pemberian subsidi untuk saprodi seperti benih dan pupuk .
2. Dampak dari pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan pertanian melalui pengembangan kelembagaan sudah berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat yang meliputi pendapatan, Tingkat pengangguran dan investasi/tabungan para petani. Dari pemberdayaan ini juga sudah bisa memberikan dampak yang positif untuk pemberdayaan perempuan yang ada dikawasan ini.
3. Impelemtasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan pertanian melalui pengembangan kelembagaan menurut persfektif islam sudah mulai diterapkan dengan hasil menerapkan Prinsip Prinsip Ukhuwah, Prinsip Ta'awun, Prinsip Kesetaraan Antar Umat. Berdirinya lembaga ini memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat sekitar daerah pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terbukti dari tercapainya kebutuhan manusia dalam maqasyid syariah yaitu kebutuhan Dharuriyah (primer), kebutuhan Al-Hajiyyah (Sekunder) dan Tahsiniyah (Tersier). Disisi lain lembaga juga

sudah menyisihkan sedikit penghasilannya untuk diberikan kepada masjid ketika hari raya tiba seperti Hari Raya Idul Fitri Atau Hari Raya Idul Adha.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Rekomendasi Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka saran peneliti sebagai berikut:

1. Saran untuk Pihak pengelola dan pemerintah untuk mengevaluasi dan Lebih memperhatikan lagi para petani seperti membenahan akses dan memaksimalkan fasilitas agar tempat pertanian semakin maju dan lebih meningkatkan promosi termasuk pada media sosial agar lebih dikenal khalayak luas dan menjadi lembaga sebagai media percontohan dalam pengelolaan pertanian.
2. Saran untuk pengelola lembaga untuk memberikan penyuluhan rutin untuk mendapatkan daya tarik yang lebih untuk menarik minat bagi para calon petani.
3. Saran untuk Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan pengkajian lebih dalam terkait dengan implementasi dan solusi dari hambatan yang dihadapi lembaga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan pertanian menurut persfektif islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- S.Pd., M.Pd., Kadek Rai Suwena, M Pd Dra Lulup Endah Tripalupi, and Ni Putu Yuni Kartika. "Analisis Pendapatan Kaum Perempuan Sebelum Dan Setelah Mengikuti Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (Spp) Di Desa Penebel." *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha* 4, no. 1 (2014).
- Agu, Wawan, Farid Th. Musa, and Funco Tanipu. "Eksistensi Tengkulak Dalam Menunjang Perekonomian Petani Jagung Di Desa Juriya, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo." *Dynamics of Rural Society Journal* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.37905/drsj.v1i1.6>.
- Aidilof. "Kebijakan Kelembagaan Pada Usaha Sapi Perah Di Provinsi Aceh." *Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa* 47 (2016): 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/290590-kebijakan-kelembagaan-pada-usaha-sapi-pe-3d465db8.pdf>.
- Aji, Alan Bayu, Yuris Tri Naili, and Monica Puspa Dewi. "Politik Hukum Pengaturan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa." *Jurnal Hukum In Concreto* 1, no. 1 (2022): 39–56.
- Anantanyu, Sapja. "Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya" 7, no. 2 (2011): 102–9.
- Anantanyu, Sapja, Margono Slamet, and dan Prabowo Tjitropranoto. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kelembagaan Petani (Kasus Di Provinsi Jawa Tengah) Effectivity of Famer's Institution and Their Determinant's Factors (Case: Province of Central Java)." *Jurnal Penyuluhan, Maret* 5, no. 1 (2009).
- Astuti, Lifa Indri, Hermawan, and Mochammad Rozikin. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 3, no. 11 (2015): 1886–92. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1061>.
- Astutik, Sindi, and Ertien Rining Nawangsari. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Sheltered Workshop Peduli 'Sambung Roso' Di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 4 (2023): 381–85. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i4.646>.
- Barat, Lampung, Indeks Pembangunan Manusia, and Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah. "Pembangunan Manusia 8," 2023, 2022–24.
- Barlan, Zessy Ardinal. "Analisis Peran Kelembagaan Lokal Terhadap

- Kondisi” 2, no. April (2018): 147–54.
- Dzulhijjah, Lisda, Deden Sumpena, and Ali Azis. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).” *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i1.24162>.
- Emi Dewi Susanti, Nalom Siagian, and Hisar Siregar. “Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Perempuan Di Kabupaten Nias Selatan.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 3, no. 1 (2023): 107–23. <https://doi.org/10.51622/jispol.v3i1.1345>.
- Fatkullah, M, and M A F Habib. “Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Peluang, Dan Tantangan Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 6 (2023): 137–53. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/20465>.
- Fitria, Indah, Nurlina Ariani Hrp, Novi Fitria Andika, and Lili Rohanita Hasibuan. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Negeri Lama Seberang Melalui Pelatihan Pembuatan Rengginang Sebagai Home Industry.” *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 4, no. 2 (2021): 99–109. <https://doi.org/10.30603/md.v4i2.2270>.
- fitria martanti. “Evaluasi Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin.” *Journal of Economic Education* 1, no. 2 (2012): 96–102.
- Galih Satriyo, Bagus, Muhammad Iqbal Fasa, and Adib Fachri. “JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)” 8, no. 1 (2022): 99–108. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jimfe/index>.
- Gunasti, Susan, and By Adam Sabra. “Journal of Islamic Studies Contents” 24, no. 3 (2013): 21–22.
- Handayani, Linda, and Aliyudin Aliyudin. “Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Keluarga Harapan (PKH).” *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2023): 21–42. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i1.24164>.
- Haryanti, Erna. “Analisis Laporan Kajian Tipikasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Di Kawasan Pedesaan Kabupaten Bekasi.” *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 20, no. 2 (2020): 32–47. <https://doi.org/10.30742/jisa20220201219>.
- Herdinawati, L. U. “Alasan Petani Muslim Menjual Hasil Panen Kepada Tengkulak Di Desa.” *Researchgate*, no. July 2014 (2017). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31089.07521>.
- Hidayat, Yayat Rahmat. “Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing

- Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018): 13–32.  
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3755>.
- Hukum, Jurnal, Magnum Opus, and Nabilah Amalia Balad. “Abdurrahman, 1980. Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria Seri Hukum Agraria V , Bandung, Alumni, Hlm. 1. 1 18” 2 (2019): 18–28.
- Isbah, Ufira, and Rita Yani Iyan. “Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Riau.” *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun VII*, no. 19 (2016): 45–54.
- Islam, Ekonomi, Dalam Pemikiran, M Umer Chapra, and M Nejatullah Siddiqi. “El Mudhorib” 2 (2022).
- Ismawati, Neneng Rini. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).” *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 6, no. 1 (2020): 91.  
<https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v6i1.4250>.
- Khalid, Muhammad, and Fajar Utama Ritonga. “Penerapan Prinsip Ukhuwah Islamiyah: Serikat Tolong Menolong Al-Amin Dusun X Desa Bandar Setia.” *Jurnal Penelitian Inovatif* 2, no. 3 (2022): 433–40. <https://doi.org/10.54082/jupin.97>.
- Kogoya Tundiles Ventje Kasenda, and Fanley N. Pangemanan. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.” *Journal Governance* 3, no. 1 (2023): 1–15.
- Kusumasyari, D, P Aisyah, S Sudaryanti, S Susiani, and ... “... Pengolahan Tanah Untuk Produktivitas Timun Dan Buncis Berkelanjutan Di Kebun Sayur Sekincau Lampung Barat.” *Biolova* 4, no. 1 (2023): 67–76.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/555494288.pdf>.
- Lestari, Anita Ida, and Andri Amaliel Managanta. “Faktor-Faktor Yang Berperan Penting Pada Peningkatan Pendapatan Petani Jagung Kuning Di Kabupaten Poso,” 2022, 129–40.
- Mannan, According M, Neo- Classical, Muhammad A Mannan, Muhammad A Mannan, and Pendapat Mannan. “Sifat Motivasional Yang Mempengaruhi” 3, no. 1 (2017): 216–38.
- Mukhlishin, Mukhlishin, and Sarip Sarip. “Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif ‘Al-‘Adl’ Dalam Al-Qur’An.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 55.  
<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1954>.
- Ngafifi, Muhamad. “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia

- Dalam Perspektif Sosial Budaya.” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 33–47.  
<https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>.
- Nikmatul Husna, and Husni Thamrin. “Konsep Mikro Ekonomi Syariah.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 43–51.  
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8516](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8516).
- Nilasari, Aprillia, and Risky Amelia. “Pengaruh PDRB Per Kapita , Indeks Pembangunan Manusia , Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Perkembangan Rasio Gini Indonesia.” *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation* 2, no. 2 (2022): 171–82.
- Normasyhuri, Khavid, Budimansyah, and Ekid Rohad. “Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19.” *Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 16.  
<file:///C:/Users/Fattia/Downloads/5793-18134-1-PB.pdf>.
- Nur, Dianna Daru. “Pengembangan Pertanian Modern Dari Perspektif Islam : Sebuah Pengantar Daru Nur Dianna,” no. March (2020): 0–28.
- Penelitian, Pusat, Pengembangan Sosial, Ekonomi Pertanian, and Jalan A Yani. “70349-ID-Alternatif-Konsep-Kelembagaan-Untuk-Pena.” *Syahyuti*, no. 70 (1985): 113–27.
- Putri, Arina Ayu, and A.A. Muttaqin. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ponorogo Cerdas (Studi Pada Mustahiq Baznas Ponorogo).” *Journal Islamic Economics and Finance in Focus* 1, no. 2 (2022): 123–34.
- Rahmawati1, Yuliana Dewi, Hartuti Purnaweni, and Tukiman Taruna. “Tahapan Pemberdayaan Masyarakatdalam Pengelolaan Lingkungan Di Desa Cangkringkecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.” *Jurnal EKOSAINS* 7, no. 4 (2016): 83–93.  
<https://jurnal.uns.ac.id/ekosains/article/view/61954/35855>.
- Ritonga, Nasrun, and Rini Viri Insy Sinaga. “Semnastekmu 2021.” *Ekonomi*, no. 2013 (2021): 181–88.
- Rugayah, -. “Sinergi Budidaya Buah Dan Sayuran Berkelanjutan Dalam Era Perubahan Iklim Di Kelompok Tani Bina Usaha Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Lampung Barat.” *Jurnal Sinergi* 1, no. 1 (2020): 95–105.  
<https://doi.org/10.23960/jsi.v1i1.14>.
- Sany, Ulfi Putra. “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam

- Perspektif Al Qur'an." *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (2019): 32. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>.
- Saputra, Lukman Adining, and Martien Herna Susanti. "Peran Omah Tani Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Petani Di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang." *UCEJ: Unnes Civic Education Journal* 3, no. 2 (2014): 34–40. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej>.
- Sholichah, Nihayatus, and Charity Oktoliya. "Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah Di Kampung Susu Lawu Kelurahan Sarangan Kacamatan Plaosan Kabupaten Magetan." *Asketik* 5, no. 2 (2021): 175–204. <https://doi.org/10.30762/asketik.v5i2.826>.
- Sihombing, Yennita. "Inovasi Kelembagaan Pertanian Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan." *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences* 5 (2023): 83–90. <https://doi.org/10.30595/pspfs.v5i.707>.
- Sinukaban, Naik. "Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Hidrolitan Vol 1* 1, no. pertanian (2010): 1–9.
- Subekti, Priyo, Yanti Setianti, and Hanny Hafiar. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Kawistara* 8, no. 2 (2018): 148. <https://doi.org/10.22146/kawistara.30379>.
- Suhendi. "Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan." *Iqtishaduna* 1, no. 2 (2012): 299–309. <https://www.neliti.com/id/publications/314708/>.
- Sumaryanto, Yudi Rustandi. *Buku Ajar Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Petani*, 2017. [www.bali.litbang.deptan.go.id](http://www.bali.litbang.deptan.go.id).
- Swapradinta, Kurnia Dewi, Djoko Andreas Navalino, and Jupriyanto. "Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Dalam Pengembangan Desa Wisata Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Desa Wisata Tembi Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Jurnal Ekonomi Pertahanan* 5, no. 2 (2019): 253–68.
- Syafirin, Muhammad. "Konsep Kenabian Dan Wahyu Dalam Al-Qur'an: Kajian Teologis QS. Al-Nisā'." *Jurnal Moderasi* 1, no. 2 (2021): 130–50. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index>.
- Syarif, Maryadi. "Teori Dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam [Theory and Model of Institutional Development of Islamic Higher Education]." *Media Akademika*

- 28, no. 3 (2013): 341. <http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/mediaakademika/article/view/459>.
- Syed Hassan, Syed Najihuddin, Zuhilmi Mohamed Nor, Nidzamuddin Zakaria, and Abdulloh Salaeh. "Pertanian Menurut Perspektif As-Sunnah: Tinjauan Umum Pemikiran Dan Sumbangan Tokoh-Tokoh Ilmuwan Islam." *Journal Of Hadith Studies* 6, no. 2 (2021): 92–106. <https://doi.org/10.33102/johs.v6i2.151>.
- Tampubolon, Ichwansyah. "Muhammadiyah Dan Pemberdayaan Masyarakat Islam." *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 1, no. 1 (2019): 54–68. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i1.1047>.
- Wongkar, Baim, Fanley Pangemanan, and Neni Kumayas. "Strategi Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Produktifitas Tanaman Hortikultura Di Kecamatan Modinding." *Jurnal Governance* 3, no. 1 (2023): 1–13.
- Wuli, Rofinus N. "Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian Untuk Menciptakan Petani Unggul Demi Mencapai Ketahanan Pangan." *Jurnal Pertanian Unggul* 2, no. 1 (2023): 1–15.
- Zain, Arifin. "Khilafah Dalam Islam." *Manajemen Dan Administrasi Islam* 3, no. 1 (2019): 41.